



PANCASILA

Nilai Budaya, Ideologi Bangsa dan Harapan Kita



Pancasila

NILAI BUDAYA, IDEOLOGI BANGSA DAN HARAPAN KITA

Cetakan ke-2, Tahun 2010

Pancasila

NILAI BUDAYA, IDEOLOGI BANGSA DAN HARAPAN KITA

BUKU KENANGAN

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
1 Oktober 2010

**Panitia Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Republik Indonesia**

Pancasila

NILAI BUDAYA, IDEOLOGI BANGSA DAN HARAPAN KITA

Pengarah

Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Kepala Pusat Sejarah TNI
Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala,
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Direktur Nilai Sejarah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Direktur Geografi Sejarah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Narasumber

Prof. Dr. Susanto Zuhdi
Dr. Saleh As'ad Djamhari

Editor

Kasijanto Sastrodinomo

Penulis

Restu Gunawan, *Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bab 1*
Amurwani Dwi LS, *Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bab 2*
Triana Wulandari, *Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bab 3*
G. Ambar Wulan, *Pusat Sejarah TNI, Bab 4*
I Ketut Ardhana, *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bab 5*

Design Cover dan Layout

Iwan Nuryadin

Percetakan

PT. Wahana Semesta Abadi

Diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Jakarta, 2010

©HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

ISBN: 978-979-1274-36-4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Panitia Peringatan Hari Kesaktian Pancasila telah berhasil menerbitkan edisi II buku dengan judul *Pancasila: Nilai Budaya, Ideologi Bangsa, dan Harapan Kita*. Penerbitan ini dirasa perlu agar penyebarluasannya lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2010 yang mengangkat tema “Melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kita Perkokoh Jati Diri dan Karakter Bangsa”, maka buku tersebut sangat relevan. Membaca buku ini, pembaca diajak memahami Pancasila dari lingkungan hidup kita sehari-hari sehingga kesan indoktrinasi sangat dihindari. Hal ini dimaksudkan agar Pancasila dapat dipahami dan diamalkan. Melalui pendekatan kebudayaan diharapkan Pancasila benar-benar dapat dijadikan tata laku, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara. Dari situlah hakekat jati diri dan karakter bangsa dapat diwujudkan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami berbagai rongrongan untuk menggantikannya dengan ideologi lain. Rongrongan terhadap Pancasila berwujud dalam bentuk separatisme dan pemberontakan yang puncaknya adalah Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia. Kini guncangan terhadap Pancasila masih terus terjadi hanya wujudnya yang berbeda misalnya dalam bentuk terorisme kemiskinan dan ketidakadilan.

Penerbitan buku yang berkaitan dengan Pancasila akan terus dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dijadikan acuan oleh generasi muda. Untuk itulah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala akan berusaha membuat buku maupun tayangan lain yang berkaitan dengan Pancasila pada masa-masa mendatang. Untuk itu kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan buku ini, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Oktober 2010

Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala
Selaku Ketua Panitia Peringatan
Hari Kesaktian Pancasila 2010



[Handwritten Signature]
Aurora Tambunan

N.P. 195301291978092001



SAMBUTAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya buku berjudul Pancasila: Nilai Budaya, Ideologi Bangsa dan Harapan Kita, yang disusun Panitia Hari Peringatan Kesaktian Pancasila berhasil diterbitkan.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sangat penting bangsa besar dengan berbagai suku dan tradisi seperti Indonesia. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung secara religius, demokratis dan berkeadilan sosial. Untuk itu upaya berbagai pihak melakukan penyebarluasan nilai-nilai Pancasila baik dalam bentuk penerbitan maupun media lainnya sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berbagai informasi yang berkaitan dengan proses perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa dan ketangguhan Pancasila

dalam menghadapi berbagai ujian sehingga tetap kokoh bertahan sebagai dasar negara sangat membantu kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Saya menyambut baik penerbitan buku ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat dan generasi penerus Indonesia.

Jakarta, September 2009

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Republik Indonesia



Jero Wacik

Ir. Jero Wacik, S.E.



PANGLIMA TNI

SAMBUTAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Pancasila: Nilai Budaya, Ideologi Bangsa dan Harapan Kita yang disusun oleh Panitia Hari Peringatan Kesaktian Pancasila.

Penulisan ini merupakan langkah positif sebagai upaya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara tetap perlu dilestarikan dalam mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, demokratis, integratif, dan berkeadilan.

Pancasila yang digali dari budaya bangsa Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang berinteraksi dengan nilai-nilai universal yang dirumuskan oleh pendiri negara sebagai fasafah dan dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar dan identitas kebangsaan Indonesia harus secara terus menerus direvitalisasi dalam mengantisipasi perubahan pada era globalisasi.

Berdasarkan pengalaman sejarah seperti terlihat pada peristiwa tragedi nasional tahun 1965, Pancasila telah mengalami cobaan berat. Namun demikian, Kesaktian Pancasila telah terbukti menjadi wahana pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda Indonesia.

Jakarta, September 2009
Panglima TNI



[Signature]
Joko Santoso
Jenderal TNI



Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala	iii
Sambutan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia	v
Sambutan Panglima TNI	vii
1. Pancasila dalam Khasanah Budaya Indonesia	1
2. Pancasila Sebagai Landasan Bangunan Negara.....	17
3. Pancasila dalam Tantangan Ideologis.....	31
4. Pancasila yang Teruji	49
5. Harapan Kita, Sebuah Renungan	63
Daftar Pustaka	75



1 Pancasila dalam Khasanah Budaya Indonesia

Penggalian Nilai Budaya

Suatu kali Sukarno pernah mengatakan bahwa Pancasila digali dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti yang kita kenal sekarang sebenarnya telah lama mengendap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai yang menjelma menjadi lima sila dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, itu hakikatnya merupakan nilai budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Penggalian terhadap berbagai bentuk khasanah budaya masyarakat Indonesia, seperti ungkapan tradisional dan karya sastra klasik, menunjukkan ada nilai moral yang dapat dipandang sebagai akar gagasan Pancasila. Beberapa contoh wujud khasanah budaya yang dibahas di sini memperlihatkan keterkaitannya dengan makna sila-sila dalam Pancasila.

Berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*, dalam budaya masyarakat Jawa,

misalnya, dikenal ungkapan *manunggaling kawula lan Gusti* atau bersatunya hamba dan Tuhan. Ungkapan ini berhubungan dengan kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Jawa tentang bersatunya manusia dengan Tuhan yang dipandang merupakan taraf hidup manusia tertinggi. Ajaran *manunggaling kawula lan Gusti*, yang sangat dekat dengan ajaran mistik Jawa, merupakan inti *Serat Wedhatama* anggitan Sri Mangkunegara IV, dan *Serat Dewa Ruci* yang ditulis Yasadipura I.

Dalam *Serat Wedhatama*, Sri Mangkunegara menyebutkan bahwa penyatuan manusia dengan Tuhan dapat terwujud jika manusia mampu melepaskan dari dirinya sendiri dan dari nafsu duniawi. Bunyi pupuh I:2 serat tersebut:

*Sapa ntuk wahyuning Allah
gya dumilah mangulah ngelmu bangkit
bangkit mikat rih mangukut
kutukaning jiwangga
yen mengkono kena sinebut wong sepuh
liring sepuh sepi hawa
awas rorong atunggi*

[Barang siapa menerima rahmat Allah ia akan mampu mengolah ngelmu Sehingga menjadi miliknya dan dapat melepaskan diri dari dirinya sendiri orang seperti itu dapat disebut tua (berpengalaman dalam *ngelmu*)

KOLEKSI RESTU GUNAWAN



Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak
Refleksi religiositas umat Islam

dan berarti ia bebas dari segala nafsu dan memiliki pengertian yang mendalam tentang duitunggal]

Sementara itu, dalam *Serat Dewa Ruci* yang berbentuk syair dalam tembang macapat juga digambarkan konsep *manunggaling kawula lan Gusti*. Diceritakan, Bima diutus oleh gurunya, Durna, supaya mencari *tirta pawitra* atau air kehidupan sebagai upaya menemukan jati diri. Dalam perjalanan mencari jati diri yang penuh rintangan itu Bima tiba di dasar samudra dan bertemu dengan Dewa Ruci sehingga terjadi *loroning atunggal*. Itulah saat bersatunya hamba, yakni Bima, dengan dewanya, yaitu Dewa Ruci. Pengembaraan itu memberikan pengalaman hidup yang tak ternilai, dan mengajarkan Bima mengenali siapakah dirinya di hadapan Sang Khalik.

Dua cerita tersebut merefleksikan bahwa manusia Jawa telah mengenal dan menjalankan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam tingkat paling awal melalui ajaran mistik. Pada tahap yang lebih lanjut, pemahaman ketuhanan tersebut akhirnya dicari melalui ajaran keagamaan dengan menjalankan perintah kitab suci yang dibawa para rasul utusan Tuhan.

Selanjutnya, contoh nilai yang terkandung dalam sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, dapat kita gali dari khasanah budaya Minangkabau. Dalam



KOLEKSI RESTU GUNAWAN

Pura di Bali
Refleksi religiositas umat Hindu

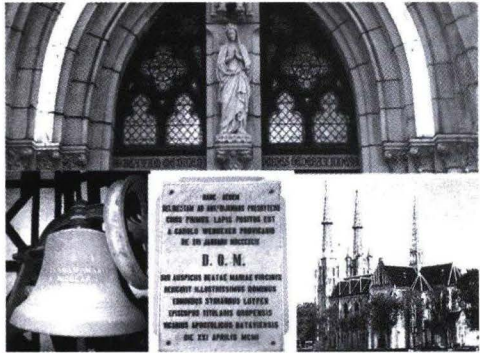
masyarakat itu dikenal ungkapan *nan pandai tampek baguru, nan tahu bakeh batanyo*, artinya yang pandai tempat berguru, yang tahu tempat bertanya. Jadi, bila ingin menambah ilmu pengetahuan, cari dan bertanyalah kepada orang yang pandai sebagai guru. Maksud ungkapan itu, setiap manusia pada dasarnya memiliki makna sosial yang bermanfaat bagi sesamanya, dan karena itu selayaknya dikembangkan sesuai kemampuan masing-masing.

Nilai budaya sila kemanusiaan tersebut juga terdapat dalam ungkapan tradisional masyarakat Gorontalo yang berbunyi *delo popoli lo dangga-dangga mopehu u'aloliyo* yang berarti "seperti sifat laba-laba mencari makanannya." Setiap laba-laba akan membuat sarangnya masing-masing, dan setelah selesai dibuat ia akan berdiam diri menunggu mangsa masuk ke dalam jaring perangkapnya. Apa yang terjatuh di sarang itulah yang menjadi makanannya. Laba-laba tidak mau mengambil makanan di sarang laba-laba yang lain. Ungkapan itu mengandung makna bahwa manusia seharusnya tidak gegabah mengambil hak orang lain, tahu membatasi diri dan tidak tamak sehingga merugikan orang lain.

Tentang nilai sila *Persatuan Indonesia* dapat ditemukan misalnya dalam ungkapan tradisional



Altar dalam sebuah Kelenteng
Refleksi religiositas umat Budha



KOLEKSI RESTU GUNAWAN

Gereja Katedral Batavia (sekarang Jakarta)
Refleksi religioisitas umat Kristiani

masyarakat di Sangir Talaud *kahiwung andi nawawa, pinenesa lendang su woba*, "sarung anak terbawa dibuat baju sepanjang pelayaran." Istilah *andi* dalam ungkapan ini adalah sang kekasih. Munculnya ungkapan ini dilatarbelakangi kisah cerita rakyat tentang dua orang pelaut Sangir Talaud bernama Lahawuwang dan Makaampo. Keduanya bersahabat dan bekerja sebagai pimpinan sebuah kapal yang sering berlayar dalam jangka waktu sangat lama sehingga timbul kerinduan akan kampung halaman, terutama kerinduan terhadap kekasih mereka. Untuk mengobati rasa rindu, kain sarung pemberian sang kekasih dijadikan baju, sebagai pengganti kekasih yang seakan selalu berada di samping mereka.

Pesan yang tersirat dari cerita tersebut adalah berupa anjuran agar setiap orang yang bepergian jauh tidak melupakan kampung halaman. Seseorang dianggap terpuji apabila ia tetap mau mengenal kampung halamannya, orang tua serta sanak saudaranya. Dikaitkan dengan Pancasila, nilai yang terkandung dalam ungkapan itu sejalan dengan sila ketiga khususnya tentang cinta Tanah Air.

Masyarakat Jawa mengenal ungkapan *ala mati neng wisma, becik mati kang utama*, "buruk mati di rumah, yang baik adalah mati secara utama." Ungkapan ini



REPRO/ISTIMEWA

Perjuangan bersenjata melawan penjajah
Wujud kekesatriaan prajurit

menjelaskan bahwa setiap prajurit harus menunaikan tugasnya sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Perbuatan seorang kesatria yang paling luhur adalah berperang sampai titik darah penghabisan di medan perang. Ungkapan ini dimaksudkan sebagai nasihat kepada prajurit di Mangkunegaran, Surakarta. Sebagai prajurit yang bersifat kesatria, mati di medan pertempuran merupakan kemuliaan dan keutamaan daripada mati di rumah tetapi tidak sedang melakukan apa-apa.

Nasihat tersebut terdapat dalam *Serat Tripama* karangan Mangkunegara IV, yang menggambarkan darma tiga kesatria yaitu Sumantri, Kumbakarna dan Basukarna dalam membela bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan sehingga gugur di medan perang. Beberapa petikannya:

Kumbakarna kinon mangsah jurit, mring kang raka sira tan lenggana nglungguhi kasatriyane, ing tekad datan sujud, amung cipta labuh nagari, lan noleh yayah rena nyang leluhuripun,

wus mukti haning Ngalengko mangke, arsa rinusak ing bala kapi punagi mati ngrana.

Terjemahannya,

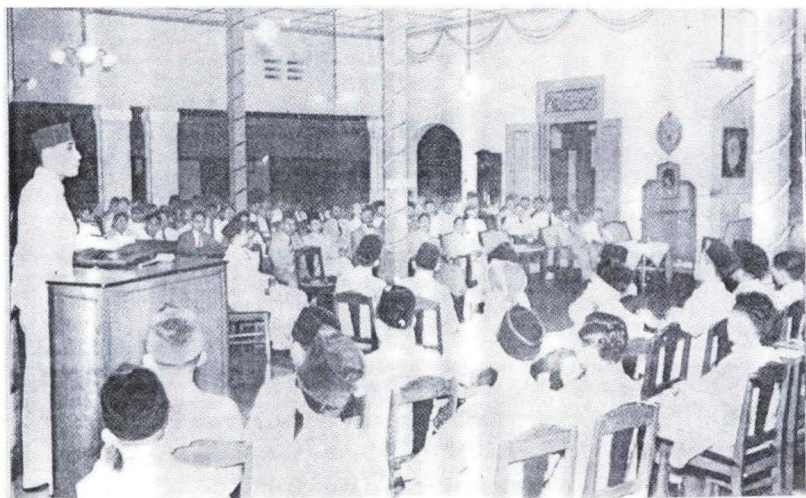
Setelah mendengar perintah dari kakaknya (Dasamuka) untuk melawan musuh yang menyerang negaranya, Kumbakarna berangkat tanpa menolak karena memegang teguh sifat kesatria walaupun di dalam hatinya sesungguhnya ia tidak menyetujui perbuatan kakaknya yang salah, tetapi ia tetap berangkat ke medan perang untuk membela negara, keluhuran keluarga dan bangsanya. Maka ia bersemboyan lebih baik mati dalam peperangan daripada hidup mewah di Alengka tetapi dirusak prajurit nera.

Kerelaan Kumbakarna membela negaranya itu merupakan bentuk rasa cinta terhadap Tanah Air dan sangat relevan dengan sila Persatuan Indonesia.

Dalam mencari nilai sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, kita dapat menggali, misalnya, dari ungkapan tradisional masyarakat Ternate, *luri deno cempaka no waje si no kokumpo woka-woka pila poga no waje laka si no piara*, "nuri besar dan elok kaukatakan buruk dan membuangnya, gagak dengan sayap patah kaukatakan baik dan memeliharanya." Burung nuri melambangkan sifat baik sedangkan gagak melambangkan sifat buruk. Makna ungkapan itu adalah agar setiap orang yang mengambil suatu keputusan



Tunanetra berlatih gamelan
Kemanusiaan bagi semua



Kongres Bahasa Indonesia di Solo, 1938
Bermusyawarah mencari bahasa nasional

dapat mempertanggungjawabkannya secara moral. Ungkapan tersebut digunakan untuk mengingatkan orang agar berpikir cermat dan matang sebelum mengambil suatu keputusan dan melakukannya secara jujur sehingga yang benar tetap benar yang salah adalah salah. Biasanya, ungkapan itu diucapkan dalam pertemuan umum warga desa, dan bisa berfungsi menyindir kepada seseorang yang tidak bertanggung jawab atas putusan yang telah dia buat.

Masyarakat Minangkabau mengenal ungkapan *bajanjang naik batanggo turun*, "berjenjang naik, bertangga turun," menggambarkan rumah panggung adat di sana yang bertangga. Maknanya sebagai nasihat atau anjuran agar dalam menyelesaikan suatu masalah sebaiknya dilakukan bertahap melalui tingkatan yang seharusnya dilalui. Masyarakat Minangkabau terdiri dari lapisan sosial *saparuik* (seperut), sekaum, sesuku, senagari dan lain-lain, yang dipimpin oleh seorang yang dipilih secara musyawarah. Ungkapan *bajanjang naik batanggo turun* digunakan untuk memberi nasihat dalam memecahkan suatu persoalan yang rumit.

Betapa penting menghargai kesepakatan bersama tecermin dalam ungkapan tradisional masyarakat Aceh *menyoe kana pakat, lampoeh jirat jeut ta pegala*. Artinya, apabila suatu kesepakatan melalui musyawarah telah dicapai maka "lahan kuburan (keluarga atau *kawoem*) pun boleh digadaikan." Ungkapan itu mengajarkan perlunya menjunjung ketaatasasan bersikap terhadap suatu keputusan bersama yang bermanfaat bagi orang banyak.

Akhirnya, nilai budaya yang dipandang mengandung sila kelima, *Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, dapat kita telusuri dalam ungkapan masyarakat Kalimantan Barat *manundun bua' maaman, manangke bua' alabatan, tundun pasilo'ang unto pasi kamusangan, urea ase jangan, ase yang juataan, ase koo'boan dung, ase sanik bendera*, "menangkai buah yang baik, menangkai buah yang lebat, tangkai disatukan, dipetik dan dikumpulkan menjadi semua jenis padi jangan *juataan, koo' anik bendera*." Di sini, *ase jangan, ase yang juataan ase koo' boan dung, dan ase sanik bandera* adalah sebutan berbagai jenis ladang yang dianggap paling baik ditanami padi.

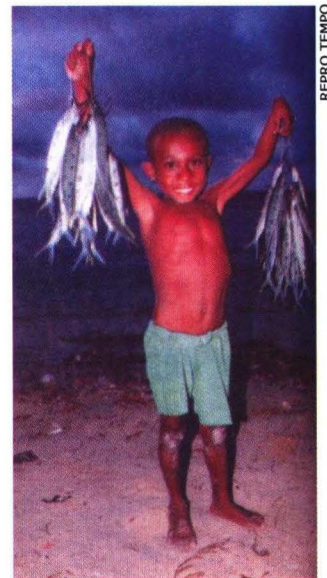
Ungkapan tersebut merupakan petunjuk tentang benih padi berkualitas baik untuk ditanam, dan cara menuainya. Biasanya, ungkapan itu diucapkan penuturnya secara langsung kepada para pendengarnya atau diajarkan para orang tua kepada anak-anak dan generasi muda agar mereka mengerti tentang tata cara bertani secara baik, benar dan lengkap. Nilai moral ungkapan tersebut relevan dengan sila keadilan sosial karena mengandung ajaran tentang usaha manusia untuk bekerja keras dalam mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan sosial.

Dalam masyarakat Seram Ambon terdapat ungkapan tradisional, *hehe hehele kupu muriyalane hehe huhu kupu tau'u*, atau "letakkan bubu kecil

dapat ikan *bubara*, letakkan bubu besar dapat *kupu tau'u*." Ungkapan ini berisi nasihat agar orang berbuat adil terhadap sesamanya dan tidak pilih-pilih. Bubu adalah alat penangkap ikan yang dilabuhkan di laut sedangkan *hehele* adalah bubu yang dipasang di kolam pasang surut. Ikan *bubura* hidup di laut dalam yang panjangnya bisa mencapai satu meter dan tergolong ikan yang mahal, sedangkan ikan *tau'u* merupakan jenis ikan kecil yang hidup di balik batu dan karang.

Lazimnya, ungkapan tersebut digunakan untuk menyindir orang yang kurang menghargai pekerjaan orang lain. Misalnya, warga kampung yang bertugas menyediakan konsumsi dan peralatan (biasa disebut "tenaga dapur") dalam suatu pesta, cenderung kurang dihargai. Sebaliknya, para tamu yang berdatangan saat pesta berlangsung dilayani dengan baik dan djunjung tinggi karena mereka membawa bermacam hadiah. Pelajaran yang perlu dipetik adalah bahwa kesuksesan suatu pekerjaan merupakan kerja keras banyak pihak sehingga semuanya layak memperoleh penghargaan yang sama. Kearifan itu jelas sesuai dengan sila keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila.

Berbagai bentuk khasanah budaya di Indonesia yang sarat dengan ajaran moral tersebut mengalami transformasi ke dalam pemikiran tokoh pergerakan, terutama pada awal abad ke-20 ketika masyarakat kolonial Indonesia bangkit memperjuangkan pembaruan dan ingin melepaskan diri dari penjajahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam khasanah budaya tradisional tersebut mengilhami ekspresi "pengucapan" politik modern. Ketika mendirikan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda pada 1922, misalnya, Mohammad Hatta dan kawan-kawan secara sadar menetapkan tujuan organisasi itu untuk persatuan, demokrasi, dan pembebasan Indonesia dari penjajahan. Sementara itu, Sukarno yang membentuk Partai Nasional Indonesia pada 1927 dengan yakin memilih asas menolong



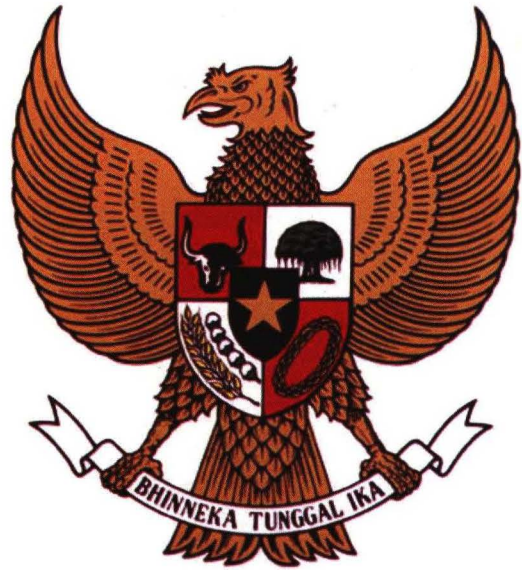
Panen Ikan
kesejahteraan untuk semua

diri sendiri, non-kooperasi, dan marhaenisme sebagai arah perjuangan menuju Indonesia Merdeka.

Lambang Negara Republik Indonesia

Proses penciptaan lambang negara, Garuda Pancasila, yang dikenal sekarang ini, memakan waktu cukup panjang. Pembuatan lambang negara itu merupakan manifestasi pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945, dan hasil rapat Dewan Menteri 10 Juli 1951. Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Panitia Lencana Negara dibentuk, yang terdiri atas Muh. Yamin dan Sultan Hamid II yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat.

Setelah melakukan penelitian, Panitia Lencana Negara menghasilkan konsep Lambang Negara. Konsep tersebut digali dari mitologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya mitologi Jawa yang didasarkan pada gambar burung rajawali yang dianggap sebagai burung sakti dan berbudi baik. Burung tersebut terlukis pada relief Candi Dieng, Candi Prambanan, Candi Panataran dan candi lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Candi Dieng, burung garuda dilukiskan sebagai manusia berparuh dan bersayap, sedangkan pelukisan pada Candi Prambanan dan candi-candi di Jawa Timur menampilkan burung berparuh panjang dan berambut raksasa bercakar. Selain itu sayap Garuda juga digunakan untuk menghias gapura masjid di Sendang Dhuwur di pantai utara Jawa Timur, membuktikan bahwa penduduk pantai utara Jawa telah memeluk Islam. Sayap terbuka burung garuda merupakan hasil karya cipta budaya.





KOLEKSI DIREKTORAT PURBAKALA

Patung Garuda di Candi Sukuh
Raja burung yang membebaskan

Sebagai raja burung yang besar dan kuat, Garuda menggambarkan kekuatan pembebas. Dalam konteks sejarah Indonesia, Garuda melambangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Perlambangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 direpresentasikan dalam jumlah bulu kedua sayap Garuda yang masing-masing terdiri 17 helai sebagai lambang tanggal, 8 helai bulu ekor melukiskan bulan (Agustus), sedangkan 19 helai bulu pangkal ekor dan 45 bulu leher melambangkan tahun kemerdekaan.

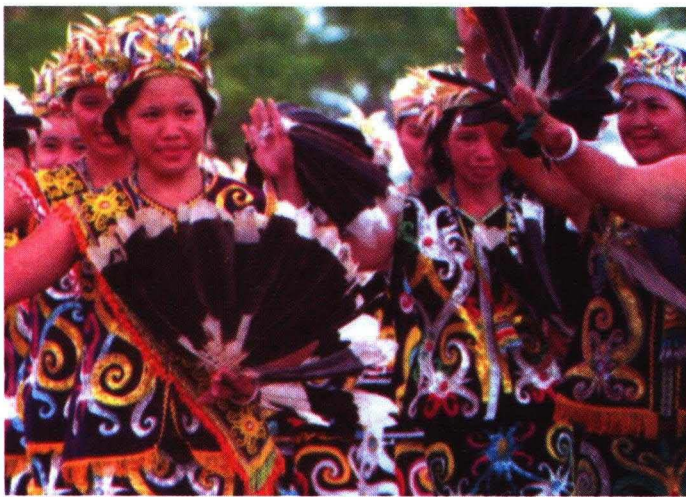
Sebagai lambang negara, Garuda mengenakan kalung perisai hingga berjuntai di dada, yang melukiskan sifat pelindung. Perisai itu berhiaskan lima simbol yang merepresentasikan lima sila dalam Pancasila. Pada bidang tengah perisai terdapat gambar bintang bersegi lima yang melambangkan *nur* atau cahaya sebagai simbol sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada cahaya yang mampu menyinari seluruh isi Bumi kecuali bintang di langit; demikian pula tidak ada kekuatan yang mampu membimbing dan mencerahkan kehidupan umat manusia ke arah yang lebih baik kecuali Tuhan Yang Mahakuasa.

Gambar pada bidang lain yang mengitari gambar bintang adalah untaian rantai yang melambangkan

perikemanusiaan sebagai sila kedua. Rantai melukiskan ikatan solidaritas yang kuat sehingga mampu mengikat bangsa Indonesia yang beragam dalam satu kesatuan. Sila ketiga, persatuan, dilambangkan melalui gambar pohon beringin yang rindang sehingga memberikan keteduhan. Dalam konteks Pancasila, pohon beringin bermakna sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Bukan suatu kebetulan pula karena pohon beringin sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, seperti terlihat pada relief candi di Jawa, dan sebagai tanaman di setiap alun-alun.

Selanjutnya, gambar kepala banteng menyimbolkan sila kerakyatan. Banteng adalah binatang perkasa yang dapat melambangkan kekuatan rakyat Indonesia yang siap menghadapi kemungkinan ancaman terhadap Tanah Air. Kekuatan itu dihimpun dan dipandu dalam satu asas kebersamaan. Dalam tradisi budaya Nusantara, banteng atau lembu yang berjuluk Nandi merupakan kendaraan Dewa Siwa seperti terlihat pada relief Candi Prambanan. Di Tanah Toraja, kepala lembu juga dianggap sebagai benda keramat dan digunakan untuk menghias rumah adat. Demikian pula rumah adat Minangkabau yang disebut *anjung*, pada dasarnya menggambarkan tanduk binatang.

Sila terakhir, keadilan sosial, dilambangkan dalam gambar padi dan kapas sebagai representasi bahan pangan dan sandang. Kedua jenis tanaman itu memberikan makna kemakmuran negara Indonesia, dan digunakan sebesar-besarnya untuk



REPRO TEMPO

Salah satu tarian daerah di Indonesia
Cermin kebhinnekaan

menyejahterakan rakyat. Gambar padi dan kapas juga digunakan oleh Paku Buwono X sebagai lambang Kasunanan Surakarta, dan bahkan lambang atau logo organisasi pada masa kontemporer.

Sementara itu, kaki Garuda mencengkeram pita bertuliskan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pertama kali, seloka *bhinneka iunggal ika* digunakan dalam *Kakawin Sutasoma* yang juga dikenal sebagai *Purusadasanta*, karya pujangga Mpu Tantular pada zaman keemasan Majapahit abad ke-14. Petikan ungkapan *bhinneka tunggal ika* dapat dilihat dalam kutipan berikut:

*Hyang Buddha tan pahi Siwa raja-dewa rwawekadhatu winuwus wara Buddha wiswa,
bhinneki rakwa ring apan kena parwosen, mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal.
Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa.*

Dalam pikiran Mpu Tantular, Dewa Budha tidak berbeda dari Dewa Siwa, sang raja dewa; keduanya memiliki sejumlah unsur di dunia, Budha yang tinggi kedudukannya itu adalah dunia semesta alam. Dapatkah keduanya yang dibedakan itu dipisahkan (pengertiannya) menjadi dua? Zat sang Budha dan zat sang Siwa itu hanya satu. Mereka itu dapat dibedakan (*bhinneka*) tetapi sesungguhnya satu (*tunggal ika*). Tidak ada agama yang mengakui dua dewa.

Dari kutipan tersebut jelas bahwa frase *bhinneka tunggal ika* dalam kitab *Sutasoma* menggambarkan keesaan Tuhan. Meski terkandung unsur Siwa dan Budha, kalimat *tan hana dharmam ang rwa* (tidak ada agama yang mengakui dua dewa) jelas menunjukkan adanya pengertian keesaan.

Bhinneka tunggal ika yang berasal dari bahasa Jawa Kuno itu menginspirasi semangat pejuang Indonesia. Ketika Belanda menerapkan politik adu domba terhadap masyarakat Indonesia, para pemimpin nasionalis Indonesia berkeyakinan bahwa hanya persatuan yang dapat mematahkan kaum penjajah. Untuk itulah dicari semboyan yang sesuai dengan perjuangan bangsa Indonesia. Berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku tetapi bercita-cita menjadi satu bangsa, maka *bhinneka tunggal ika* atau "berbeda-beda tetapi satu jua" sangat cocok dengan cita-cita persatuan Indonesia. Dengan demikian, *bhinneka tunggal ika* yang semula mengandung pengertian filsafat agama berubah menjadi pengertian filsafat negara yang mencita-citakan kesatuan bangsa



SUMBER FOTO: MUSEUM PENGHIANATAN PKI, LUBANG BUAYA

PEMBERONTAKAN PKI MADIUN

2 Pancasila sebagai Landasan Bangunan Negara

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai sifat terbuka dan dinamis, berkembang melalui komunikasi dan interaksi kebudayaan yang kemudian mengalami proses kompromi. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan sistem ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang ataupun masyarakat dalam seluruh kehidupannya untuk mencapai tujuan hidupnya. Pancasila sebagai ideologi bermakna harus mampu memberikan orientasi, wawasan, asas dan pedoman yang normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti landasan yang memiliki kekuatan yuridis konstitusional. Jelaslah bahwa fungsi dasar Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit berdasarkan pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka, Pancasila adalah dasar yang melandasi bangunan negara Republik Indonesia. Ini berarti Pancasila sebagai landasannya, sebaliknya yang menolak Pancasila berarti merombak bangunan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, secara singkat Pancasila adalah landasan ideologis bagi negara Republik Indonesia. Secara prinsipiil, kenyataan ini harus dipegang teguh.

Peranan BPUPK

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pertama kali dicetuskan dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, *Dokuritsu Jumbi Cosakai*) yang diumumkan pada 29 April 1945. Dalam kata sambutan *Gunseikan* (Kepala Pemerintah Militer di Jawa) tersirat maksud bahwa Jepang hendak menarik simpati dan dukungan pihak Indonesia dalam usaha memenangkan perang Pasifik. Kemenangan atas peperangan melawan Sekutu di Pasifik merupakan tugas suci yang harus dipikul bersama antara bangsa Indonesia dan Jepang.

Badan Penyelidik tersebut dipimpin oleh K. R. T. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua (*kaico*), dan R. P. Soeroso sebagai wakil ketua (*fuku kaico*) merangkap kepala Tata Usaha (*zimukyokuco*). Dua pejabat lainnya adalah Masuda Toyohiko sebagai wakil kepala Tata Usaha, dan Mr. R. M. Abdul Gafar Pringgodigdo. Badan Penyelidik terdiri atas Badan Perundingan yang dipimpin seorang ketua yaitu K. R. T. Radjiman Wediodiningrat, dua orang wakil ketua yaitu R. P. Soeroso dan Ichibangase. Anggota-anggota Badan Penyelidik, yang tidak termasuk pimpinan berjumlah 60 orang, ditambah tujuh anggota istimewa berkebangsaan Jepang.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan diresmikan pada 28 Mei 1945 jam 15.30 bertempat di Gedung *Cuo Sangi In*. Pada masa penjajahan

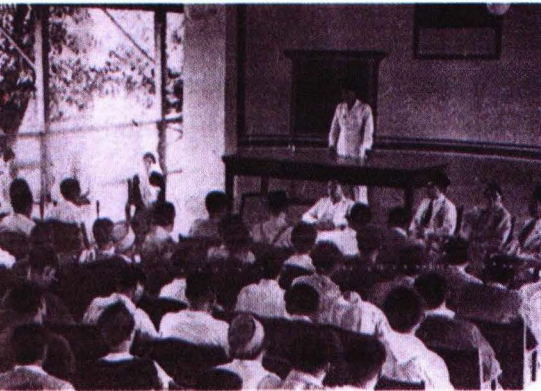


Tentara Jepang masuk Jakarta 4 Maret 1942
Babak menuju transisi

Belanda gedung ini digunakan sebagai tempat persidangan *Volksraad*, dan pada masa Jepang sebagai tempat persidangan *Cuo Sangi In* (sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, Jalan Pejambon Jakarta). Meski dibentuk pemerintah militer Jepang, selama persidangan berlangsung baik wakil ketua maupun anggota istimewa berkebangsaan Jepang tidak ikut membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi, yang aktif bersidang dan membicarakan segala sesuatu tentang kemerdekaan Indonesia adalah pimpinan dan anggota dari Indonesia.

Perjuangan Intelektual Pendiri Negara

Sidang BPUPK diadakan dua tahap. Tahap pertama berlangsung lima hari, dari 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, sedangkan tahap kedua dimulai 10 Juni sampai 11 Juni. Sidang pleno hari pertama mendengarkan amanat *Saiko Sikikan*, nasihat *Gunseikan* dan pidato Ketua Radjiman Wediodiningrat. Pada sidang pertama mulai dibahas dan dirumuskan undang-undang dasar, yang dimulai dengan persoalan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dalam kata pembukaannya, Ketua Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Mereka yang membahas tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin, Soepomo dan Sukarno



Bung Karno berpidato di depan sidang BPUPK
Melangkah menuju Indonesia merdeka



Pelantikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Siap merdeka

Dalam sidang BPUPK yang pertama Sukarno mendapat giliran berbicara dua kali, yaitu pada 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun, seperti dikatakan Radjiman, setelah dua hari bersidang berlangsung tidak seorang pun yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, Sukarno kemudian menyampaikan pidato pada 1 Juni sekitar pukul 11.00. Pada waktu Bung Karno mengucapkan pidato pentingnya itu, Gedung *Cuo Sangi In* dijaga ketat tentara Jepang karena sidang itu dinyatakan tertutup, walaupun para wartawan dan beberapa orang diberi izin masuk. Bung Karno yang mengenakan setelan jas putih rapi dan peci, berpidato dengan semangat sangat tinggi. Berikut petikan pidato Sukarno:

Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indera. Apa lagi yang lima bilangannya? [seorang yang hadir: Pendawa lima]. Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi—saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa—namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelimanya dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, *Wetanschauung* kita. . . .

Pidato Sukarno tersebut mendapat sambutan dan tepukan para peserta, suatu sambutan yang tidak pernah terjadi pada pembicara lainnya selama persidangan BPUPK. Para stenograf mencatat secara cermat pidato Bung Karno yang dibawakan tanpa teks.

Dalam pidatonya itu, Bung Karno mencetuskan rumusan dasar negara Pancasila sesuai dengan permintaan Ketua BPUPK. Dalam pidato peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1964, Bung Karno menyatakan bahwa ia telah memikirkan Pancasila sejak 1918, saat baru berumur 17 tahun. Diceritakan pula bahwa pada malam menjelang 1 Juni 1945, Sukarno keluar sendiri dari rumahnya di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dan mulai merenung, berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan di bawah langit yang cerah dan bintang gemerlapan di sela-sela pohon di kebon. Pada saat itulah ia merasakan mendapat ilham dari Tuhan berupa Pancasila yang dipidatokan pada esok paginya.

Kepada Cindy Adams, penulis autobiografinya, Bung Karno menceritakan pula bahwa ketika ia berada di Ende, Flores, antara 1934--37, ia sering merenungkan dasar negara Indonesia Merdeka di bawah pohon sukun. Sukarno berkeyakinan bahwa suatu negara yang terdiri dari beribu pulau yang luas dan beraneka ragam dapat disatukan oleh satu sumpah sakti dalam satu dasar negara yakni Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan Sukarno adalah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan atau Keadilan Sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sukarno, dasar kebangsaan Indonesia itu ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan itu bertambah besar karena persamaan peruntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama. Pendeknya didorong oleh peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam di dalam hati dan otak. Demikian kriteria ini dapat dipertahankan dan diujikan sebagai cita-cita persatuan Indonesia.

Dasar kedua, internasionalisme, karena kita tidak menganut paham nasionalisme yang sempit akan tetapi harus menuju persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa. Internasionalisme bagi Sukarno sama dengan *humanity* atau perikemanusiaan, pendapat yang berasal dari gerakan sosialisme abad ke-19 dan permulaan abad ke-20.

Selanjutnya, dasar ketiga, permusyawaratan, diartikan sebagai semua untuk semua, satu buat semua, semua buat satu. Maksudnya adalah demokrasi yang membawa sistem permusyawaratan dan dewan perwakilan rakyat. Kemudian, dasar keempat, kesejahteraan sosial, menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi. Akhirnya, dasar kelima, Ketuhanan Yang Maha Esa, diartikan sebagai ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain, sehingga segenap agama yang ada di Indonesia mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya dan yang dituju oleh ketuhanan yang berkebudayaan itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.



Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Semakin dekat jembatan emas

Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila, yang, seperti telah disebutkan, berasal dari seorang ahli bahasa. Pada 1966, Bung Karno menyatakan bahwa kata *sila* berasal dari Muhammad Yamin, sedangkan *panca* berasal dari Bung Karno sendiri. Meski Pancasila merupakan ungkapan lama yang berasal dari bahasa Sanskerta, dan sudah dikenal di Indonesia dengan masuknya Hinduisme, namun Bung Karnolah yang memperkenalkan istilah itu kepada bangsa Indonesia sebagai rumusan dasar negara.

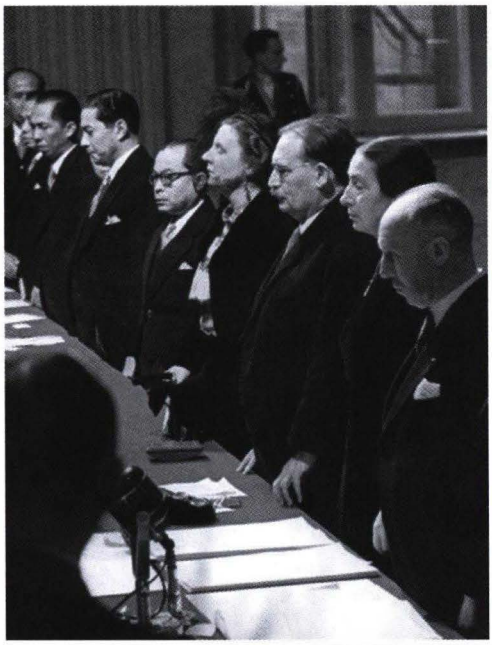
Demikian pula diceritakan oleh Kyai Mansur, seorang anggota BPUPK dan pembawa suara golongan Islam, bahwa sebelum Sukarno mengucapkan pidatonya yang terkenal sebagai "lahirnya Pancasila," Sukarno datang kepadanya. Ketika itu Kyai Mansur sedang menginap di rumah Muhammad Yamin bersama temannya, yang juga anggota BPUPK, Kyai Haji Wachid Hasjim dan Kahar Muzakkir. Mereka bertiga menginap di rumah Yamin karena lebih bebas dan banyak buku yang dapat dibaca. Bung Karno datang minta persetujuan mereka tentang pidato yang akan diucapkan pada 1 Juni esok pagi, dan mengatakan bahwa pada hakikatnya pidato itu

merupakan hasil kompromi antara nasionalis dengan golongan Islam. Isi pidato itulah yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila yang kita miliki.

Ketika berpidato, Sukarno mengemukakan kepada peserta sidang BPUPK bahwa apabila mereka tidak senang dengan angka lima, maka Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, yakni sila kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, dan internasionalisme diperas menjadi sosio-nasionalisme, sedangkan demokrasi dan keadilan social diperas menjadi sosio-demokrasi. Jadi Trisila sebagai usul alternatif meliputi sosio-nasio-nalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang menurut Bung Karno berdiri dengan kedua kakinya di tengah masyarakat, yakni nasionalisme yang berperikemanusiaan, nasionalisme yang tidak *chauvinistis*. Demikian pula sosio-demokrasi adalah demokrasi masyarakat, demokrasi yang kedua kakinya berada di tengah masyarakat. Sosio-demokrasi tidak sama dengan demokrasi Barat yang memandang liberalisme politik dan ekonomi dijunjung tinggi sehingga hanya kaum borjuis yang mendapat kesempatan untuk berkuasa dan hidup mewah, sedangkan rakyat kecil ibarat mengupas nangka dan hanya kena getahnya.

Bung Karno menyerukan agar kita membangun suatu masyarakat gotong royong yang dinamis, yang bersifat kekeluargaan. Dari semua untuk semua, sama-sama membanting tulang, sama-sama memeras keringat, untuk kepentingan bersama. Gotong royong inilah yang disebut



Pengakuan kedaulatan RIS di Belanda

Bung Karno dengan istilah Ekasila, dan diusulkan sebagai dasar negara apabila Pancasila dan Trisila tidak dapat diterima.

Gotong royong di sini bukannya gotong royong yang mengaburkan sila-sila yang diusulkan dalam Pancasila. Gotong royong yang diusulkan Bung Karno tetap mengandung unsur persatuan bangsa, nilai kemanusiaan, menjunjung asas demokrasi, yang tetap memperjuangkan keadilan sosial, dan yang memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pidato 1 Juni tersebut, usul Sukarno tentang Pancasila merupakan usul pokok, sedangkan Trisila dan Ekasila hanyalah alternatif sekalipun jiwa dan semangatnya sama. Pancasila sebagai usul pokok dasar tertera pada bagian akhir pidato Bung Karno sebagai berikut.

Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut saya, haruslah Pancasila. Sebagai dikatakan tadi, Saudara-saudara, itulah harus *Weltanschauung* kita. Entah Saudara-saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk *Weltanschauung* itu. Untuk membentuk nasionalisme Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam perikemanusiaan, untuk permufakatan, untuk *sosiale rechtsvaardigheid*, untuk Ketuhanan. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi suatu realitet, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalitet yang merdeka, ingin

hidup sebagai anggota dunia yang merdeka yang penuh dengan *sosiale rechtsvaardigheid*, ingin hidup sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk menyeleng-garakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu, perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya sifatnya dengan perjuangan sekarang lain coraknya.

Setelah sidang berlangsung beberapa hari, pertentangan antara pihak yang menghendaki negara sekuler dan negara Islam semakin tajam sehingga menimbulkan kegelisahan di antara anggota BPUPK. Namun, pidato Sukarno yang berisi uraian tentang lima sila yang bersifat kompromistis dapat mendedahkan suasana sidang sehingga menjadi modal bagi sidang selanjutnya.

Sebelum sidang pertama berakhir, dibentuk suatu panitia kecil yang diketuai oleh Sukarno, dengan anggota Mohammad Hatta, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin dan A. A. Maramis. Tim kecil ini bertugas merumuskan kembali Pancasila berdasarkan pidato Sukarno dan menjadikan dokumen itu sebagai rancangan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari panitia kecil itu dibentuk lagi panitia kecil lain yang terdiri dari sembilan orang (sehingga disebut Panitia Sembilan), yakni Sukarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, A. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Wachid Hasjim, Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Mereka menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka.

Rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. (dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

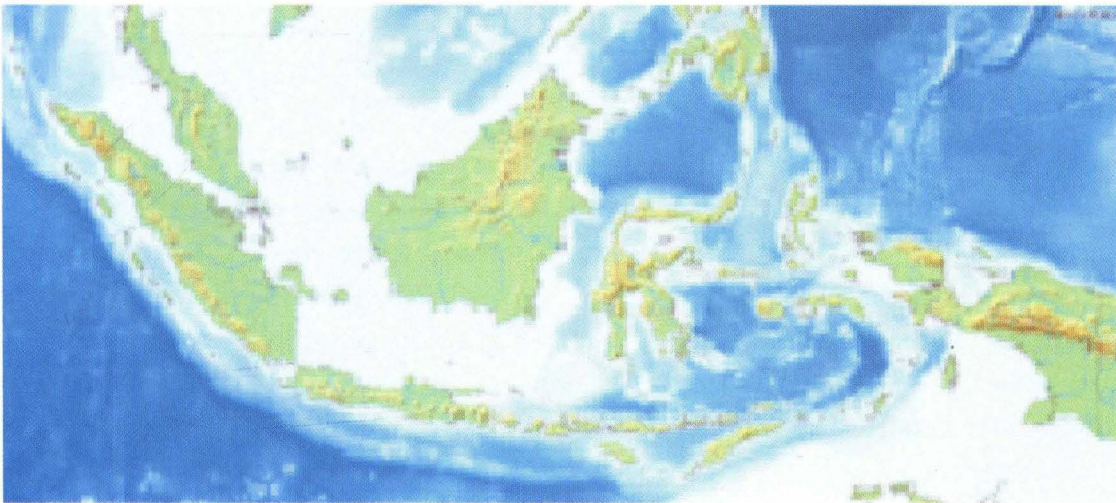
Rumusan terakhir dasar negara dilakukan pada persidangan kedua yang dimulai 10 Juli 1945. Pada kesempatan itu dibahas rencana undang-undang dasar termasuk soal pembukaan oleh

Sebuah panitia perancang undang-undang dasar. Dalam rapat 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang Dasar menyetujui isi Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. Pada penutupan sidang, 16 Juli, Radjiman memastikan semua anggota menyetujui rumusan Pembukaan UUD secara bulat dengan menyatakan,

Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya, jadi saya ulangi lagi. Undang-undang Dasar ini, kita ini diterima sebulat-bulatnya? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang disetujui yang menerima berdiri! Dengan suara bulat diterima Undang-undang Dasar ini. Terima kasih, Tuan-tuan.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan, kemudian dibentuk badan baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai Sukarno, dan wakil ketua Mohammad Hatta, serta penasihat Achmad Subardjo Djoyohadisuryo. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, tiga orang wakil dari Sumatra, dua



orang dari Sulawesi, dan masing-masing satu orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah enam orang tanpa seizin pihak Jepang.

Panitia inilah yang mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Moh. Hatta, berdasarkan pesan dari tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya," diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Rumusan itu diajukan setelah Hatta berkonsultasi dengan empat pemuka Islam yakni Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan. Pertimbangannya, suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat apabila hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian terbesar. Akhirnya rumusan autentik yang disepakati berbunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka semangat, jiwa dan ideologi yang disampaikan Sukarno dengan nama Pancasila secara resmi ditetapkan menjadi dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 disertai perubahan kecil dalam istilah dan struktur. Rumusan Pancasila pada 18 Agustus 1945 yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 memang tidak diberi nama tetapi para anggota PPKI yang dipimpin oleh Sukarno-Hatta menyadari bahwa Pancasila telah masuk di dalamnya. Jadi kita berada pada satu pengertian bahwa hanya satu Pancasila, yakni Pancasila yang dicetuskan Sukarno pada 1 Juni 1945, dan yang dijadikan dasar dan ideologi negara secara resmi sejak 18 Agustus 1945.



SUMBER FOTO: MUSEUM PENGHIANATAN PKI, LUBANG BUAYA

PERISTIWA KANIGORO

3 Pancasila dalam Tantangan Ideologis

Sepanjang sejarah perkembangannya, Pancasila telah banyak menghadapi tantangan yang datang dari berbagai ideologi “besar,” seperti liberalisme, komunisme dan islamisme yang melahirkan organisasi dan gerakan distraktif. Secara historis tantangan terhadap Pancasila berupa pemberontakan fisik seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun (1948) yang jelas-jelas membawa ideologi komunisme, dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (1949) dengan ideologi agama. Kedua ideologi itu berupaya mengganti dan meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, namun tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Pancasila juga menghadapi dinamika dan diskusi cerdas para intelektual dan politisi dalam menentukan dasar negara Indonesia pada persidangan Konstituante. Dari keragaman pilihan dasar negara dalam sidang tersebut, Pancasila tetap menjadi dasar negara kita sampai saat ini. Mencermati perjalanan sejarah selama ini, kita dapat bersepakat dengan Bung Karno yang mengatakan, “Satu-satunya ideologi . . . yang

dapat diterima pada masa yang akan datang hanyalah prinsip-prinsip Pancasila . . . yang diyakini cakupannya sangat luas dan cukup fleksibel untuk dapat diterima oleh seluruh kelompok yang ada.”

Mampukah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menjawab tantangan tersebut? Untuk menjawab tantangan itu, Pancasila harus mengembangkan beberapa wawasan dan orientasi. Pertama, berorientasi ke depan serta mengakui dan mengembangkan kehidupan sosial-religius. Kedua, turut mengembangkan kehidupan yang dinamis yang bebas dari penjajahan, kemiskinan dan kebodohan. Ketiga, kemampuan Pancasila harus diletakkan dalam fungsinya sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberontakan PKI di Madiun

Setelah kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin (11 November 1947-29 Januari 1948), Presiden menunjuk Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Hatta berhasil menyusun kabinet tanpa campur tangan golongan sayap kiri atau sosialis. Program Kabinet Hatta adalah melaksanakan Persetujuan Renville, melaksanakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, dan pembangunan.

Sementara itu, Amir Syarifuddin berbalik menjadi pemimpin oposisi terhadap Kabinet Hatta. Ia menyusun kekuatan di dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. FDR berusaha memancing bentrokan fisik terhadap lawan politiknya sehingga terjadi kerusuhan terutama di daerah Surakarta. Mereka menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delanggu. Lima hari



Operasi pembersihan terhadap pemberontak PKI Madiun
Pengejaran di Gunung Lawu

kemudian terjadi bentrokan antara kelompok pemogok melawan Serikat Tani Islam Indonesia, organisasi tani Masyumi.

Pada saat FDR melakukan ofensif, Agustus 1948, Musso, seorang tokoh PKI yang telah bermukim di Moskow sejak 1926, tiba kembali di Indonesia. Ia membawa doktrin baru (Doktrin Zhdanov) yang dijabarkannya sebagai "Jalan Baru" revolusi Indonesia. Inti doktrin tersebut adalah memutuskan hubungan dengan kapitalisme untuk selanjutnya melakukan reorganisasi PKI.

Di bidang politik, Musso mengecam kebijakan dan strategi perjuangan pemerintah menghadapi kolonialisme dan kapitalisme. Ia menganggap revolusi Indonesia bersifat defensif

dan gagal. Ia menyarankan agar dibentuk Front Persatuan Nasional. Dalam tahap perjuangan demokrasi baru, menurutnya, masih digunakan seluruh aliran politik. Kampanye politik Musso semakin ditingkatkan dengan mengadakan rapat umum. Dalam rapat umum di Madiun, ia menuduh pemerintahan Hatta telah membawa negara ke penjajahan baru dalam bentuk yang lain.

Meski mendapat serangan dari kelompok komunis, Kabinet Hatta tetap melaksanakan program rekonstruksi dan rasionalisasi militer untuk mengurangi beban anggaran negara yang memberatkan kehidupan rakyat. Rupanya program itu mendapat tantangan hebat dari Musso dan FDR karena akan menimpa banyak kader bersenjata mereka. Politik ofensif Musso tidak menggoyahkan Kabinet Hatta yang didukung oleh partai politik besar, yakni PNI, Masyumi, dan beberapa organisasi pemuda.

Pertentangan politik semakin meningkat dengan adanya insiden di Delanggu, Solo, yang menimbulkan kerusuhan bersenjata antara pendukung FDR dan pendukung Tan Malaka yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat melawan pasukan hijrah TNI. Setelah insiden tersebut, pada 18 September 1948 sejumlah tokoh PKI memproklamasikan "Republik Soviet

Indonesia” di Madiun. Kolonel Djokosuyono diangkat menjadi Gubernur Militer dan Letnan Kolonel Dahlan, Komandan Brigade 29, menjadi Komandan Komando Pertempuran Madiun. Pemberontakan tidak terelakkan, PKI menguasai Kota Madiun dan Radio Gelora Pemuda. Tindakan tersebut secara nyata bertujuan meruntuhkan Republik Indonesia, dan mengganti dasar negara Pancasila menjadi negara yang berdasarkan komunisme. Pemberontakan PKI itu terjadi pada saat bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Menghadapi pemberontakan PKI, Pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas. Presiden Sukarno memerintahkan penumpasan terhadap kaum pemberontak. Dalam pidato politik 19 September 1948, yang disiarkan melalui radio sekitar pukul 20.00, Sukarno mengatakan bahwa peristiwa Madiun dan kekacauan yang mendahuluinya di Solo merupakan kejadian yang berkaitan, dan dirancang sebagai sebuah strategi revolusioner FDR-PKI untuk menjatuhkan pemerintah nasional di Yogyakarta. Sukarno meminta secara tegas kepada masyarakat untuk memilih apakah berpihak kepada pemerintah Republik yang sah ataukah berpihak kepada kelompok Musso yang ingin memperoleh kekuasaan dengan cara menimbulkan kekacauan.

Sekitar satu jam kemudian Musso mengumumkan melalui pidato radio di Madiun bahwa pasukan yang berada di bawah komandonya akan melawan pemerintah sampai titik darah

penghabisan, dan menyerukan perang rakyat melawan apa yang dikatakannya sebagai "penjual romusha" yang sangat buruk, tidak lain Sukarno, dan "klik borjuasi" dalam pemerintahan Hatta.

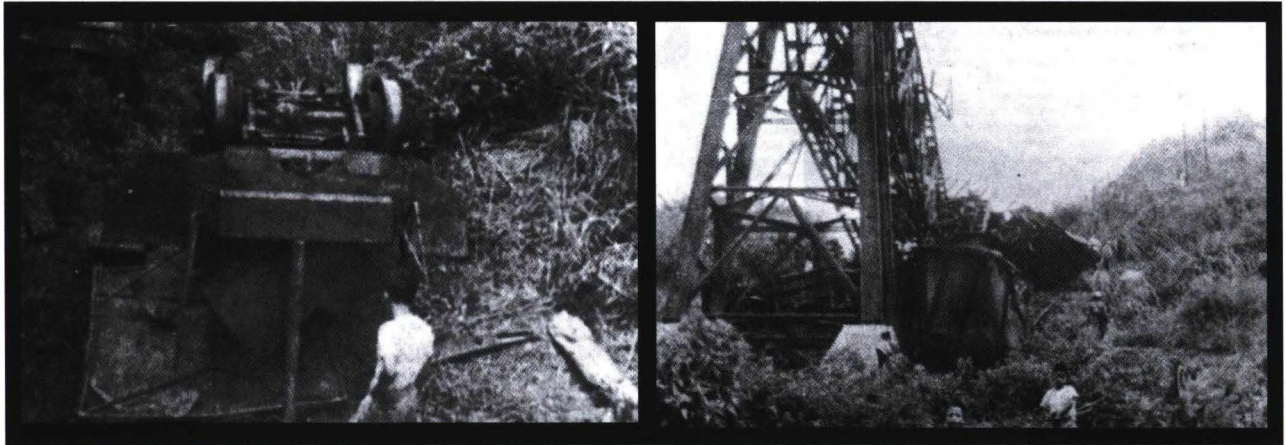
Segera setelah pidato balasan Musso tersebut, Sukarno secara resmi memerintahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk mengembalikan kekuasaan Republik di wilayah yang pada saat itu sudah dikuasai pasukan FDR-PKI. Selanjutnya Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi II Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi I Jawa Timur, dan Divisi Siliwangi untuk menumpas pemberontakan PKI.

Dengan bantuan rakyat, pada 30 September 1948 pukul 16.15, Kota Madiun berhasil direbut kembali. Pasukan pemberontak meninggalkan kota, demikian pula tokoh-tokohnya termasuk Musso. Dalam pelariannya, Musso disergap TNI dan akhirnya tewas tertembak. Pada 30 November 1948, Amir Syarifuddin ditangkap batalyon Kemal Idris di Kelambu, Purwodadi, kemudian dibawa ke penjara Kudus. Akhirnya ia tewas ditembak TNI. Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI Madiun, Republik Indonesia yang berasas Pancasila berhasil diselamatkan dari ancaman kaum ekstrem yang berlandaskan ideologi komunis.

Dalam pidato yang diucapkan pada 5 Oktober 1948, Sukarno menegaskan bahwa peristiwa Madiun merupakan bukti adanya kepentingan sektarianisme sempit partai politik dalam mempertahankan diri ketika berhadapan dengan pertahanan rakyat yang lebih baik. Satu-satunya ideologi angkatan bersenjata yang dapat diterima hanyalah prinsip-prinsip Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkesadaran nasional, berperikemanusiaan, berkeadilan sosial dan berkedaulatan rakyat, yang diyakini sangat luas cakupannya dan fleksibel dapat diterima seluruh kelompok masyarakat.

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

Umat Islam di Indonesia pada dasarnya telah memberikan sumbangan yang besar dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu dimungkinkan karena karakter ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan ukhrowi dan duniawi. Oleh sebab itu, ada pendapat yang memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Akan tetapi sebagaimana telah disepakati



Gerbong-gerbong kereta api korban gerombolan DI/TII
Malangbong, Garut, 1957

dalam dasar negara yaitu Pancasila terdapat sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian sesungguhnya tidak perlu lagi agama dijadikan sebagai dasar dan bentuk negara. Namun demikian ada golongan dan kelompok dalam Islam yang memperjuangkan agama Islam sebagai dasar dan bentuk negara. Dalam konteks itulah sebuah gerakan yang disebut Darul Islam dengan kekuatan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang bertujuan mendirikan negara Islam.

Gerakan yang memperjuangkan berdirinya negara Islam itu diproklamasikan oleh S.M Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949, sebagai gerakan yang bertujuan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan tersebut kemudian berkembang di Jawa Barat kemudian meluas ke Jawa Tengah (Amir Fatah), Kalimantan Selatan (Ibnu Hadjar), dan Sulawesi Selatan-Tenggara (Abdul Qahhar Mudzakkar).

Dalam praktiknya gerakan yang memperjuangkan berdirinya negara Islam tersebut tidak memperlihatkan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sana-sini mereka melakukan kekerasan, pembakaran dan penjarahan di kampung-kampung sehingga membuat penduduk ketakutan.

Oleh karenanya tindakan tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat terhadap tujuan DI/TII.

Tindakan yang di luar batas perikemanusiaan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu masyarakat dengan sukarela membantu aparat keamanan Republik Indonesia menumpas gerakan tersebut.



Operasi Militer terhadap DI-TII di Gunung Guntur Garut, 1951
Demi tegaknya negara kesatuan

Perdebatan di Sekitar Konstituante

Diketahui oleh Wilopo dari PNI, Majelis Konstituante mulai melaksanakan tugasnya pada 10 November 1956 di Bandung, dengan tujuan merancang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang baru dan permanen. Sebenarnya, Majelis telah menyelesaikan tugasnya, namun ketika menyangkut persoalan dasar dan ideologi negara disentuh, kompromi politik sulit dicapai.

Ada tiga ideologi negara yang bersaing dalam Majelis Konstituante yaitu Ekonomi Sosial, Pancasila, dan Islam. Dalam Majelis, kelompok pendukung Pancasila menjadi dasar negara adalah PNI (116 anggota), PKI dan Faksi Republik Proklamasi (80), Parkindo (16), Partai Katolik (10), PSI (10), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (8), dan sejumlah wakil partai kecil sehingga mencapai 273 orang.

Islam sebagai dasar negara diusulkan oleh Masyumi (112 anggota), NU (91), PSII (16), Perti (7) dan 4 partai Islam kecil dengan jumlah keseluruhan 230 perwakilan. Ekonomi Sosial diajukan sebagai dasar negara oleh 9 anggota, yang terdiri dari 4 orang anggota Partai Murba dan 5 orang anggota Partai Buruh. Masing-masing anggota kelompok politik dengan gigih mengkampanyekan ideologi mereka dan menyerang ideologi lain yang menurut mereka tidak cocok dijadikan dasar negara. Argumen politik yang disertai retorika yang kental dan sentimen keagamaan mendominasi perdebatan politik di Majelis.

Partai Murba terbentuk 7 November 1949 mengajukan prinsip Ekonomi Sosial sebagai dasar negara. Soedijono Djojoprajitno, juru bicara kelompok ini, mendefinisikan Ekonomi Sosial sebagai sistem yang melandasi kehidupan sosial dan ekonomi di negeri ini yang harus dikembangkan dan diimplementasikan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, basis seluruh kekuatan politik, sosial, dan ekonomi harus berada di tangan rakyat, tidak di tangan kaum kapitalis dan kelompok borjuis.

Mengenai Pancasila, Djojoprajitno berpendapat bahwa Pancasila adalah "ideologi yang lemah dan samar" karena sudah "dikebiri" dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag ketika perwakilan Indonesia menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Djojoprajitno bertanya, versi manakah yang digunakan, Pancasila yang dirumuskan dalam UUD 1945 yang mencerminkan tujuan Revolusi Indonesia ataukah Pancasila yang dirumuskan dalam UUD RIS yang telah "dikebiri" di Den Haag.

Ia menolak Pancasila dijadikan sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara. Ia dan partainya menyatakan akan berusaha menolak upaya menjadikan falsafah dan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Ia juga menolak Islam dijadikan dasar negara, sebaliknya, ia meyakini apabila Ekonomi Sosial (Sosialisme Indonesia) dijadikan dasar negara akan dapat mengakomodasi seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia.

Menurut Djojoprajitno, bukan ideologi yang menentukan bentuk dan isi Ekonomi Sosial, namun justru Ekonomi Sosial-lah yang menentukan bentuk dan isi suatu ideologi. Karena itu, ia mengajukan Ekonomi Sosial sebagai dasar negara, bukan sekadar ideologi dan falsafah. Baik pendukung Islam maupun pembela Pancasila tidak menerima dasar negara yang diusulkan oleh Partai Murba. Usulan Partai Murba tersebut tidak pernah mendapat dukungan luas dalam Majelis.

PKI dengan tokohnya Sakirman, K.H. Ahmad Dasuki Siradj, Njoto dan Wikana mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dan menolak Islam serta Ekonomi Sosial. Dalam menolak Ekonomi Sosial, kelompok komunis setuju bahwa Pancasila mencakup seluruh prinsip yang termuat dalam Ekonomi Sosial; dalam menolak Islam, menurut kelompok komunis, agama ini tidak mewakili segenap aliran politik dan kelompok keagamaan di Indonesia.

PKI menerima Pancasila dengan alasan Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi bersama dan kesepakatan bersama di antara aliran politik yang berkembang di Indonesia. PKI sebenarnya mendesak prinsip keyakinan kepada "Tuhan Yang Maha Esa" diganti menjadi "kebebasan beragama". Namun, ia menerima Pancasila sebagaimana dalam Pidato Sukarno 1 Juni 1945 tanpa mengubahnya demi menghormati kelompok monoteistik dan politeistik.

Kasman Singodimedjo menolak ideologi komunis untuk dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Ia menuduh PKI melakukan taktik politik untuk menyesatkan dan menggiring rakyat ke arah ateisme yang berakibat tidak hanya menghancurkan agama dan keyakinan kepada Tuhan, tetapi juga menghancurkan Pancasila. Singkatnya, tokoh-tokoh Islam terutama Masyumi, melihat komunisme di Indonesia sebagai ancaman bagi umat Islam. Menurut Natsir, tujuan komunisme adalah merebut kekuasaan dengan cara kekerasan dan kediktatoran.

Menjawab serangan Kasman Singodimedjo dan Natsir, Njoto mengatakan bahwa Komunis menerima Pancasila tidak hanya di bibir, bukan sekadar taktik politik untuk meraih kekuasaan, tetapi menerimanya dalam teori dan pengamalan. Njoto mengatakan bahwa banyak tokoh Islam terkejut dengan kesiapan PKI sebagai partai ateis yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan mereka lebih terkejut lagi, menurut Njoto, jika komunis bersedia menerima Islam sebagai dasar negara.

Sutan Takdir Alisjahbana (STA), seorang tokoh PSI, yang terbentuk 12 Februari 1948, pada dasarnya menerima Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mempersatukan segenap kelompok masyarakat di Indonesia dan menyelamatkan negara dari perpecahan dalam situasi yang kritis. Namun sebelum menerima Pancasila, STA bersikap kritis terhadap Pancasila yang menurut pendukungnya dipandang sebagai falsafah negara yang sempurna. Menurut STA, kadang terkesan Pancasila naik statusnya sebagai agama yang suci sehingga orang yang berani meragukannya dicap sebagai pengkhianat.

STA berpendapat, dalam Pancasila tidak ada kesatuan logika, bahkan terdapat inkoherensi. Namun, ia dan partainya dapat menerima Pancasila meskipun pihaknya memiliki pandangan yang berbeda tentang Pancasila dibanding kelompok lain.

Partai Katolik berdiri di Surakarta 8 Desember 1945 melalui juru bicaranya V.B. da Costa dan P.S. da Cunha mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan dengan gigih menolak Islam sebagai dasar negara. Da Cunha menjelaskan alasannya, bukan maksudnya tidak mencintai umat Islam, namun karena keimanan mereka yang mutlak terhadap kebenaran agama Katolik. Menurutnya, merupakan kesalahan besar apabila menerima Islam sebagai dasar negara, karena hal itu berarti agama di luar Islam tidak lagi mutlak dan benar.

Da Cunha menolak kritik Mohammad Natsir yang menganggap Pancasila adalah sekuler dengan menunjukkan ungkapan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sila pertama Pancasila, "berkat rahmat Allah", yang tercatat dalam Pembukaan UUD 1945, dan "Negara berdasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan" yang tertulis dalam batang tubuh UUD 1945. Hal itu merupakan indikasi yang jelas bahwa Pancasila tidak terpisah dari pengaruh agama.

Seperti Partai Katolik, Parkindo yang didirikan 8 Desember 1945 dengan tegas menolak Islam dan memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu tokohnya yang terkemuka, J. B. Kawet berargumen bahwa Pancasila telah digunakan sebagai dasar negara selama 12 tahun (1945--57) dan terbukti berhasil menghadapi tantangan dan gangguan. Ia

merasa bahwa apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara, maka akan terjadi disintegrasi bangsa karena orang Kristen di Sumatera Utara, Kalimantan, Minahasa, Sangihe-Talaud, Ambon, Timor, Flores, Irian Barat dan wilayah lain di Indonesia tidak menerima Islam.

Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) dari partai Masyumi menjawab pernyataan Kawet dengan menunjukkan adanya kebebasan dan toleransi beragama yang dirasakan umat Kristiani Koptik di Mesir sebagai negara Islam. Hamka juga mencontohkan tokoh Muslim Mesir, Sa'ad Zaghlul yang mempunyai seorang pembantu terkenal orang Kristen Koptik Makram Ubayd sebagai bukti bahwa Muslim di Mesir bersikap toleran dengan orang Kristen. Demikian pula di Indonesia, Sukarno yang Muslim mengangkat pembantunya Arnold Mononutu yang Kristen. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada penghalang bagi Muslim dan Kristiani bekerja sama dalam mengabdikan kepada negara.

Sejak awal PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Suwirjo, Ketua PNI, mengatakan Ekonomi Sosial dan Islam bukan pilihan buruk. Menurut Suwirjo, Pancasila adalah satu-satunya dasar negara yang ideal. Oleh karena itu, harus terus dianjurkan dan diimplementasikan sebagai dasar negara karena ia sudah berlangsung selama 12 tahun. Jika Pancasila diganti dengan dasar negara yang lain, ia mengkhawatirkan terjadi disintegrasi bangsa Indonesia.

Seluruh partai Islam yakni Masyumi, Perti, NU, PSII, Aksi Kemenangan Umat Islam, dan Partai Persatuan Tharikat Islam, bergabung dalam Majelis Konstituante untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Perwakilan partai Islam menolak Pancasila yang dikonsepsikan Sukarno atau Pancasila yang secara resmi tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, mereka dapat menerima Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta.

Perwakilan nasionalis Muslim menjustifikasi perjuangan mereka untuk menetapkan Islam sebagai dasar negara dengan menunjuk beberapa ayat Al-Quran (Surah al-Maidah: 44, 45, dan 47):

. . . barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir;...barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim; . . .barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Ahmad Zaini (NU) menganggap Pancasila hanyalah slogan yang sulit dibuktikan dalam kenyataan. Saifuddin Zuhri (NU) mengkritik Pancasila karena tidak menawarkan sila-sila yang meyakinkan bagi umat Islam. Ia mencontohkan sila pertama Pancasila yang menurutnya dapat ditafsirkan secara berbeda menurut ajaran Islam tentang *tawhid* (keesaan Allah S.W.T) atau menurut ajaran Kristen yang mengakui doktrin Trinitas, dan ajaran agama yang lain.

Osman Raliby (Masyumi) juga mempersoalkan dan menilai sila Ketuhanan dalam konsepsi Pancasila Sukarno sebagai Tuhan yang mati dan tidak memiliki pengaruh terhadap empat sila lainnya. Jika Pancasila diperas, maka Tuhan pun "diperas" lalu hilang dalam prinsip gotong royong yaitu Eka Sila sebagai perasan utama Pancasila.

Di mata Isa Anshary (Masyumi), Pancasila juga tidak jelas dan samar karena pendukungnya tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan terhadap umat. Menurutnya, Pancasila adalah prinsip yang tidak berdasar dan tidak menawarkan apa-apa kecuali kekosongan. Oleh karena itu, menurut Isa, tidak seperti Islam yang memberikan doktrin komprehensif dan bersumberkan wahyu Ilahi, Pancasila tidak mempunyai dasar dan tidak memadai sebagai dasar negara.

Natsir juga mengatakan Pancasila sebagai falsafah bernegara tidak jelas dan tidak mengatakan apa-apa bagi jiwa umat Islam yang sudah memiliki ideologi yang pasti, jelas, dan sempurna, ideologi yang menyala di hati rakyat Indonesia sebagai inspirasi yang hidup dan sumber kekuatan. Bertukar ideologi Islam dengan Pancasila bagi seorang Muslim seperti melompat dari tempat yang mantap ke tempat yang kosong.

Natsir membandingkan Pancasila dengan Islam dan menyimpulkan bahwa Pancasila adalah konsep yang netral, abstrak, dan sekuler (*la diniyyah*). Menurutnya, Pancasila tidak

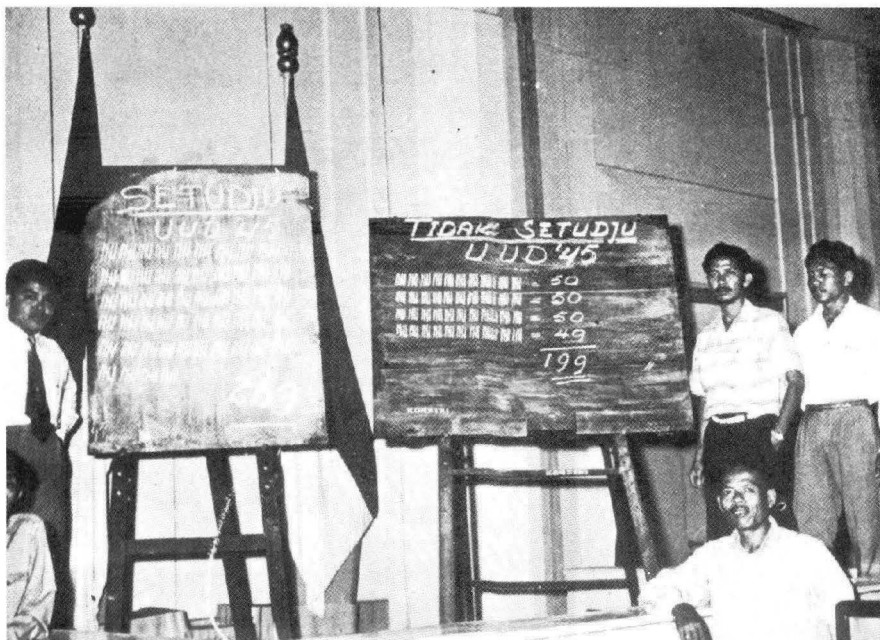
bersumberkan wahyu dari Tuhan, tetapi berdasarkan pemikiran sosiologis dan ide-ide filsafat sekuler.

Roeslan Abdulgani (PNI) tidak menyetujui pendapat Natsir yang mengaitkan sekularisme dengan Pancasila. Ia mengatakan Pancasila merupakan gabungan dari modernisme Islam, demokrasi modern, marxisme, dan musyawarah yang mengakar di pedesaan. Keberadaan Departemen Agama juga menunjukkan bahwa Pancasila tidak sekuler. Konsep Pancasila yang netral dan relatif menunjukkan sifatnya yang terbuka dan dinamis.

Perdebatan ideologis yang memanas antara perwakilan partai politik Islam dan partai politik non-Islam dalam Majelis Konstituante tidak menghasilkan kompromi politik karena masing-masing pihak tidak mau menyerah dan kukuh dengan ideologi masing-masing. Dalam situasi kritis itu, Presiden Sukarno setelah berkonsultasi dengan anggota kabinet dan didukung oleh tentara di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution, memutuskan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sejak pemberlakuan Dekrit Presiden, Pancasila diterapkan secara permanen dan efektif sebagai dasar negara sampai saat ini. Bagaimanapun, Sukarno menegaskan bahwa Piagam Jakarta merupakan jiwa dan nafas UUD 1945. Presiden Sukarno kemudian membubarkan Majelis Konstituante dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Bersama dengan pembubaran Majelis Konstituante, Sukarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.

Pada 1964 terjadi kehebohan dalam masyarakat sehubungan ceramah D.N. Aidit, Ketua Politbiro CC PKI selaku Menko/Wakil Ketua MPRS di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora. Dalam ceramahnya, Aidit mengatakan, "Bila kita (Indonesia) telah mencapai taraf hidup adil dan makmur dan telah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak lagi membutuhkan Pancasila." Aidit juga menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu dan bila persatuan sudah tercapai maka Pancasila tidak diperlukan lagi. Sikap Aidit terhadap Pancasila ini merupakan upaya untuk menurunkan derajat Pancasila sebagai dasar negara. Sikap tersebut



Hasil voting Sidang Konstituante
Kembali ke UUD 1945

menjadi faktor timbulnya Gerakan 30 September 1965. Gerakan ini merupakan yang kedua kalinya dilancarkan PKI untuk menggulingkan NKRI yang berlandaskan Pancasila.

Dari paparan tersebut sangat jelas Pancasila menghadapi tantangan dan rongrongan dalam bentuk kekerasan bersenjata, pemaksaan pendapat, dan perdebatan ideologis berkepanjangan yang mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam situasi kemelut politik dan ideologi yang keras, keberadaan Pancasila tetap kukuh tak tergoyahkan.



SUMBER FOTO: MUSEUM PENGHIANATAN PKI, LUBANG BUAYA

PENGACAUAN SURAKARTA "PERISTIWA DI SRIWEDARI"

4 Pancasila yang Teruji

Pematangan Situasi

Gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan oleh PKI berlatar belakang konflik ideologi dan politik dalam menafsirkan gagasan revolusi Presiden Sukarno. TNI Angkatan Darat menafsirkan revolusi sebagai perubahan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebaliknya PKI menafsirkan revolusi berdasarkan ideologi marxisme-leninisme. PKI berpendapat bahwa masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi "setengah jajahan dan setengah feodal". Revolusi 17 Agustus 1945 dianggap gagal karena dipimpin oleh kaum borjuasi nasional. Ketika Presiden Sukarno mencanangkan "penemuan kembali revolusi kita" dan menciptakan konsep-konsep revolusinya ditafsirkan secara berbeda oleh PKI dan TNI AD sebagai kekuatan politik utama pada waktu itu. PKI memanfaatkan konsep revolusi Sukarno untuk melakukan perubahan secara radikal dalam segala bidang.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut berbagai peluang dimanfaatkan PKI untuk mematangkan situasi yang

dibutuhkan suatu gerakan revolusioner. Di bawah naungan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), PKI mengaktualisasikan konsep tersebut dengan memanfaatkan kondisi politik dalam dan luar negeri.

Kharisma Presiden Sukarno yang kuat menyebabkan tidak ada yang berani menentangnya. Kondisi itu menguntungkan PKI untuk berlindung di balik kekuatan Presiden dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. PKI secara terang-terangan mendesak Presiden untuk membubarkan lawan-lawan politiknya yang disebutnya sebagai komunistofobia dan kontrarevolusi, seperti Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS), Partai Murba, PNI, Manifes Kebudayaan dan lain-lain. Aksi politik PKI itu menimbulkan antipati dari berbagai pihak yang tengah berjuang mempertahankan Pancasila.

PKI menciptakan eskalasi konflik yang disebutnya dengan situasi revolusioner disertai aksi-aksi dalam segala bidang. Dalam bidang politik, PKI melakukan taktik penyusupan ke dalam organisasi politik, mahasiswa, pelajar, buruh, tani, dan Angkatan Bersenjata yang dikenal dengan "Kerja di Kalangan Musuh".

PKI menaruh perhatian terhadap kebudayaan dalam arti luas termasuk pendidikan. Sebagai unsur kebudayaan, seni memperoleh perhatian PKI secara intensif karena merupakan media yang paling efektif untuk menyebarkan paham komunisme ke dalam bahasa rakyat. Selain itu kesenian rakyat, seperti ludruk, wayang, reog, ketoprak, musik angklung, dan tari juga merupakan alat efektif untuk meramaikan suasana ofensif revolusioner. Setiap pertunjukkan



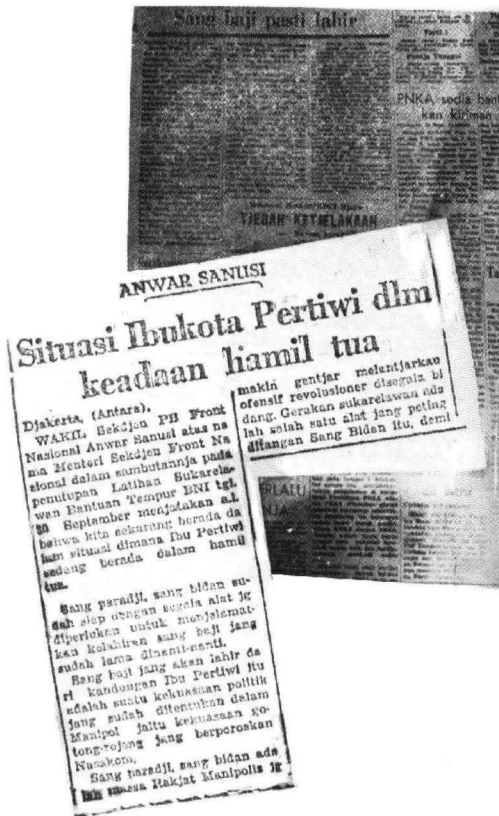
Perang di media massa
Pematangan situasi

dijadikan sarana pengumpulan dan memobilisasi massa dimanfaatkan untuk beragitasi dan berpropaganda tanpa izin pemerintah.

Aksi-aksi massa yang bersifat ofensif revolusioner lainnya dilakukan dalam gelar poster dan spanduk yang dipampang di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. PKI menggunakan *Harian Rakjat* sebagai media provokasi untuk melancarkan tuntutan mereka, seperti pengganggangan “setan kota dan desa” serta kapitalis birokrat, pembentukan kekuatan bersenjata di luar TNI, dan “meritul” lawan-lawan politik mereka. Selanjutnya di bidang keamanan dan ketertiban, PKI melakukan pengacauan dalam bentuk agitasi, adu domba, penculikan, aksi sepihak, perampokan, bahkan pemfitnahan. Aksi teror juga mereka lakukan terutama terhadap kelompok agama.

Menjelang pemberontakan PKI/1965, jargon politik luar negeri Indonesia membangun kekuatan negara-negara sedang berkembang, yang disebut *the New Emerging Forces (Nefo)*. Hal itu terlihat dalam hubungan yang erat misalnya dengan negara-negara Blok Timur, khususnya RRC. Ketika Perdana Menteri RRC Chou En Lai berkunjung ke Indonesia (Mei 1965), ia menyarankan pembentukan Angkatan V dengan mempersenjatai buruh dan petani, di luar kekuatan ABRI. Angkatan V dirancang untuk memperkuat pasukan dalam rangka memperhebat konfrontasi terhadap Malaysia yang dianggap kaum komunis sebagai boneka imperialis yang mengancam ketahanan Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A. H. Nasution dan Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani secara tegas menolak pembentukan Angkatan V yang dinilai tidak efisien. Lagi pula pada waktu itu telah dibentuk organisasi Pertahanan Sipil. Konflik semakin buruk seiring meningkatnya serangan terbuka PKI terhadap elite Angkatan Darat, yang mereka pandang bergaya hidup mewah, dan reaksioner dalam sikap politik. Perkembangan situasi politik dalam negeri menunjukkan adanya kubu-kubu yang saling berhadapan, yakni PKI dan kekuatan Nasakom progresif revolusioner pada satu pihak, dan Angkatan Darat beserta kekuatan anti-Nasakom. D.N. Aidit meniupkan isu Dewan Jenderal yang diartikan sebagai dewan pengatur dan pengendali kegiatan politik terhadap PKI. Istilah Dewan Jenderal diperkenalkan pertama kali oleh PKI, sedangkan jenderal yang dinilai menghambat program PKI adalah para pimpinan TNI-AD termasuk Jenderal Nasution. Selanjutnya Aidit menugasi Biro Khusus untuk mengembangkan sinyalemen tentang Dewan Jenderal yang dipersepsikan kepada pihak luar, terutama kepada Presiden Sukarno, sebagai kenyataan yang membahayakan revolusi dan negara. Antara Mei sampai Juli 1965 berkembang berbagai isu, antara lain menyebutkan ada jenderal AD yang tidak sejalan dan tidak loyal terhadap kebijakan Pemimpin Besar Revolusi. Isu berkembang semakin keras dengan beredarnya kabar bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta.



Di tengah meluasnya isu tersebut, beredar dokumen Gilchrist diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia (1962--63) yaitu Sir Andrew Gilchrist yang di dalamnya menyebut "our local army friends" yang ditafsirkan sebagai Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal yang semula dikaitkan dengan persoalan dalam negeri, dikembangkan menjadi isu internasional. Tuduhan baru dimunculkan bahwa AD bekerja sama dengan kaum imperialis, justru saat Indonesia sedang melakukan konfrontasi terhadap negara boneka neokolonialisme Malaysia.

Selain melalui saluran Biro Khusus, isu "Dewan Jenderal hendak melakukan *coup*" juga disebarakan melalui saluran lain, seperti organisasi massa, partai politik, dan para tokoh PKI kepada pejabat-pejabat negara. Komite Daerah Besar (CDB) digunakan sebagai saluran isu di daerah-daerah hingga tingkat

bawah. Selain itu, anggota Fraksi PKI memanfaatkan pula saluran resmi, seperti di DPRGR, DPA, dan Front Nasional. Instansi pemerintah juga dimanfaatkan sebagai saluran penyebaran isu, seperti Kejaksaan Agung, Badan Pusat Inteljen, serta partai politik antara lain Partindo dan PNI. Akhirnya, isu tersebut sampai pada sasaran pokok yaitu Presiden Sukarno.

Menanggapi isu tersebut, Presiden Sukarno memanggil Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani untuk melakukan konfirmasi mengenai isu "Dewan Jenderal yang hendak menilai kebijakan PBR". Jenderal Ahmad Yani membantah bahwa isu tersebut tidak benar. Ia menjelaskan

kepada Presiden mengenai perintah Panglima Angkatan Darat untuk mengumpulkan para perwira senior guna bertukar pikiran, berkaitan dengan persoalan revolusi Indonesia saat itu. Pada kesempatan tersebut Jenderal Yani menyampaikan pula tentang Dewan Jenderal yang sesungguhnya tidak ada. Dewan yang terdapat dalam institusi Angkatan Darat adalah Dewan Kebijakan Tinggi yang bertugas menilai dan mempromosi perwira tinggi.

Menuju Kudeta

Selain dipenuhi jargon revolusioner, pentas politik nasional kurun 1965 dimanfaatkan untuk melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Dalam rangka konfrontasi itu, pemerintah menggerakkan Angkatan Bersenjata dan memobilisasi sukarelawan (sukwan) dan sukarelawati (sukwati). AD, AL dan AU melaksanakan berbagai kursus kader revolusi dan pelatihan sukwan dan sukwati.

Salah seorang perwira menengah, Mayor Udara Suyono [dalam ejaan asli Sujono], setelah mengikuti kursus kader revolusi mengambil langkah melampaui batas wewenangnya sebagai Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan (P3AU). Mayor Suyono mengirimkan telegram rahasia kepada para Komandan Batalyon P3AU di Komando Regional Udara (Korud) dan Komandan Kompi (Danki) P3AU di setiap pangkalan udara untuk menyiapkan bintara pelatih dan melaksanakan pelatihan sukarelawan bagi kepentingan operasi Dwikora.

Mayor Suyono gagal melaksanakan pelatihan sukwan di setiap pangkalan udara karena larangan para panglima Korud, Komandan Pangkalan maupun Komandan Koramil setempat. Larangan tersebut ditegaskan Panglima Korud VI Jawa Barat merangkap Komandan PAU Husein Sastranegara, Kolonel Udara Ashadi Cahyadi [ejaan asli Tjahjadi]. Akhirnya, Mayor Udara Suyono menyelenggarakan latihan bagi



Demonstrasi pemuda, pelajar dan mahasiswa, 1965
Bubarkan PKI!

sukwan/sukwati yang dipusatkan di area kebun karet di Kampung Lubang Buaya, kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, sejak Juli 1965.

Dalam laporannya kepada Menteri/Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Mayor Udara Suyono menyampaikan bahwa para peserta pelatihan berasal dari Front Nasional, terdiri dari lima orang golongan agama yang diundang tetapi tidak seorang pun yang datang, sedangkan jumlah peserta dari golongan komunis mencapai 2000 orang. Omar Dhani terkejut saat mendengar laporan tersebut dan memerintahkan kepada Suyono untuk melakukan perubahan perencanaan pelatihan seperti kurikulum, pembagian waktu dan keseimbangan jumlah antargolongan peserta pelatihan. Namun, Menteri/Panglima Angkatan Udara menolak mewisuda sukwan/sukwati ketika Mayor Suyono memintanya.

Pelatihan di Lubang Buaya, yang semula untuk kepentingan Dwikora, pada Angkatan II (Agustus 1965) diubah menjadi Wahana Krida Revolusi (Hada Hanrev). Para peserta pelatihan terdiri dari ormas PKI, seperti Serikat Buruh, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat (PR), kaum buruh nonpartai dan simpatisan PKI. Selama latihan seluruh peserta menggunakan nama samaran. Mayor Suyono menggunakan nama samaran Pak Djojo. Latihan berlangsung antara 710 hari. Para siswa yang bernilai baik memperoleh tambahan pengetahuan dan pelatihan khusus di bidang intelijen selama empat hari.

Meskipun pelatihan di Lubang Buaya secara resmi dipimpin Mayor Udara Suyono, pada praktiknya kewenangan pelaksanaan pelatihan berada di tangan petugas PKI, di antaranya Nico (anggota Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI), Djohar (PR), Kasiman (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOBSI), dan Hartoyo (BTI), sementara itu Tjoegito dan Soemadi (Comite Central, CC PKI) bertindak sebagai pengajar. Perubahan pelatihan sukwan/sukwati menjadi Harda Hanrev di Lubang Buaya yang dipimpin para tokoh komunis semakin menunjukkan kepentingan PKI. Organisasi massa yang PKI telah mengikuti latihan kemiliteran di Lubang Buaya disiapkan menjadi bagian kekuatan dalam rencana Gerakan 30 September 1965.

Sementara itu, kabar sakit Presiden Sukarno pada awal Agustus 1965 memunculkan desas-desus terjadi perubahan mendadak atas keseimbangan kekuatan. Situasi itu memaksa pimpinan PKI mengambil langkah antisipatif jika Presiden menderita sakit keras atau meninggal dunia. Selama itu, PKI memanfaatkan figur Bung Karno untuk melindungi

dari konflik mereka dengan TNI-AD. Pada bulan yang sama, D.N. Aidit selaku Ketua CC PKI menginstruksikan kepada Sjam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI untuk menyusun rencana kudeta.

Rangkaian rapat perencanaan kudeta yang dimulai sejak pertengahan Agustus semakin intensif sampai akhir September 1965. Rapat 29 September 1965, yang dihadiri Brigjen TNI Supardjo dan diselenggarakan di rumah Sjam Kamaruzaman, merupakan pertemuan terakhir bagi rencana gerakan tersebut. Rapat menghasilkan keputusan final tentang pelaksanaan gerakan, termasuk penentuan sasaran gerakan, tempat pengamanan setelah tindakan, penentuan hari "H" dan jam "D", yakni 30 September 1965 lewat tengah malam.

Seusai rapat, Sjam beserta Letkol Untung, Kolonel Latief dan Mayor Udara Suyono menemui Aidit untuk melaporkan secara rinci seluruh persiapan gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah. Aidit menamai operasi itu Gerakan Tiga Puluh September (G-30-S) sesuai waktu pelaksanaan. Sjam melaporkan, sasaran jangka pendek gerakan adalah membentuk Dewan Revolusi, sedangkan sasaran jangka panjang membentuk pemerintahan yang dikuasai oleh kaum komunis seutuhnya.

Menjelang hari "H" dan jam "D", sekitar pukul 21.00 diadakan pertemuan kembali di rumah Sjam yang dihadiri Aidit, Pono, Bono, Mayor Jenderal Reksosamudra dan Mayor Suyono untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap organisasi gerakan militer, tenaga cadangan, pasukan Batalyon 454 Para Diponegoro dan Batalyon 530 Para Brawijaya yang telah berada di Jakarta sejak 25 September 1965. Pada pukul 23.00, Sjam selaku ketua pelaksana gerakan menempati

Central Komando sebagai posko dan menjalankan tugas sesuai petunjuk pimpinan CC PKI. Sementara itu, Aidit berada di rumah Sersan Udara S. Suwardi di Kompleks Halim Perdanakusuma.

Selanjutnya massa PKI sebanyak empat batalyon yang memperoleh latihan di Lubang Buaya dipanggil secara bergelombang dan dibagi ke dalam satuan pasukan. Pasukan Pasopati bertugas menculik Jenderal A.H. Nasution dan para jenderal lain, Pasukan Bimasakti bertugas menguasai ibu kota Jakarta Raya, sedangkan Pasukan Gatotkaca merupakan pasukan cadangan yang ditempatkan di Lubang Buaya.

Pukul 01.30 dini hari 1 Oktober 1965 Letkol Untung sebagai pimpinan gerakan bersama Brigjen Supardjo dan Mayor Udara Suyono meninjau persiapan terakhir di Lubang Buaya. Selanjutnya pada pukul 03.30 kedua perwira yang disebut terakhir bergabung kembali dengan Aidit. Sementara itu, sejak malam 30 September terjadi kesibukan yang luar biasa di Lubang Buaya yang digunakan sebagai tempat berkumpul pasukan yang akan melaksanakan gerakan. Antara lain Kompi Brigif I Kodam V/Jaya, Pemuda Rakyat, Gerwani, kompi dari Batalyon 454/Diponegoro, Batalyon 530/Brawijaya, dan Resimen Cakrabirawa yang tergabung dalam Divisi Ampera.

Pada 1 Oktober 1965, pukul 02.30, Lettu Dul Arief, Komandan Pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal, mengumpulkan para anggotanya. Ia memberikan briefing kepada para komandan peleton dan membagi tugas Pasukan Pasopati. Ia

menjelaskan bahwa yang diculik adalah tokoh-tokoh Dewan Jenderal yang hendak melakukan *coup* terhadap Presiden Sukarno. Oleh karena itu, mereka harus ditangkap hidup atau mati. Sebagai taktik, anggota pasukan penculik diinstruksikan untuk menyebutkan bahwa mereka mendapat perintah agar para jenderal yang akan diculik itu menghadap Presiden.

Gerakan 30 September PKI yang dimulai pukul 03.00 dinihari 1 Oktober 1965 berhasil melaksanakan tugas dan membawa para korban penculikan, baik dalam kondisi meninggal maupun hidup ke Lubang Buaya. Di antaranya Men/Pangad Letjen A. Yani, Deputy II/Pangad Mayjen TNI Suprpto, Asisten I/Pangad Mayjen TNI S. Parman, Deputy III Men/Pangad Mayjen TNI M.T. Haryono, Oditur Jenderal Militer/Inspektur Kehakiman AD Brigjen TNI Sutoyo, Asisten II/Pangad Brigjen TNI D.I. Panjaitan dan Ajudan Menko Hankam/Kasab yaitu Lettu Piere Tendean. Sedangkan Jenderal TNI A.H. Nasution yang dijadikan sasaran terpenting, berhasil meloloskan diri dari para pelaku penculik, yang berjumlah sekitar seratus orang dan merupakan kelompok pasukan terbesar. Namun dalam peristiwa itu putrinya, Ade Irma Suryani Nasution yang berusia lima tahun, tertembak oleh seorang anggota Cakrabirawa saat dibawa keluar pengasuhnya dari kamarnya. Dalam peristiwa itu, gugur pula Aipda Karel Satsuit Tubun, pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena.

Sumur tua Lubang Buaya, basis pelatihan sukwan/sukwati, dijadikan tempat penguburan para jenderal. Lokasi tersebut berhasil dilacak berkat kesaksian seorang agen polisi Sukitman yang ditangkap oleh regu penculik Jenderal Panjaitan. Mayor Subardi, ajudan Jenderal A. Yani, Sukitman sebagai pemandu, satu regu dari Yon Pomad Para, rombongan fotografer Pom Dam/Jaya, dan Lettu Urip Komandan Kompi Benhur RPKAD merupakan tim operasi pencarian terhadap para jenderal pimpinan AD yang menjadi korban penculikan. Selain melakukan investigasi, di lokasi itu Mayor Bardi menemukan sejumlah lubang berisi peti peluru, pakaian hujan, gundukan batu dan kawat berduri untuk latihan *vuurdoop* dan menembak.

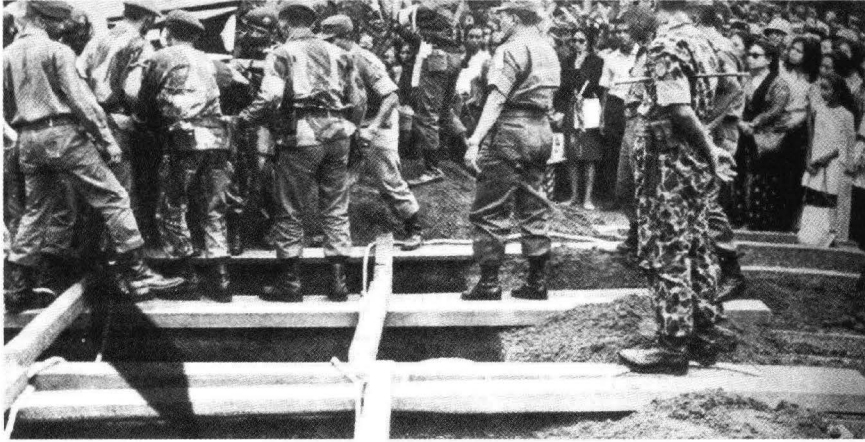
Di lereng kali dan petak tegalan ditemukan sejumlah lubang galian yang sengaja dibuat untuk menyesatkan keadaan sebenarnya. Temuan tersebut memperkuat bukti ada pelatihan sukwan/sukwati di Lubang Buaya yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa, misalnya para buruh perkebunan dari Medan.

Kesaktian Pancasila

Dalam makalah berjudul *Dari 1 Oktober 1965 ke 1 Oktober 1980* yang disampaikan di Kampus Institut Teknologi Bandung (2 Oktober 1980), Jenderal TNI (Purn.) Nasution memberikan kesaksiannya tentang peristiwa kudeta PKI.



Pengangkatan jenazah dari sumur di Lubang Buaya



Pemakaman tujuh Pahlawan Revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Gugur demi Ibu Pertiwi

Dalam pandangannya, usaha kudeta tersebut seharusnya berhasil dengan sukses. Pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi pada waktu kudeta dilancarkan telah "hamil tua". Para pelaku telah melakukan persiapan teliti dan memanfaatkan peluang dari kebijakan Presiden Sukarno yang menguntungkan PKI, struktur Dewan Revolusi yang dibentuk oleh Biro Khusus PKI tersebar di berbagai daerah. Pelaku kudeta sangat percaya diri sehingga lalai mempersiapkan alternatif rencana seandainya gerakan itu gagal.

Meski persiapan kudeta PKI di atas kertas sangat matang, kenyataannya upaya mereka untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunisme kandas. Dalam hal ini Nasution meyakini bahwa kegagalan G-30-S/PKI tidak terlepas dari tangan Tuhan yang diperlihatkan oleh banyaknya faktor "kebetulan", di antaranya ia sendiri lolos dari sasaran penculikan. Pada akhirnya kegagalan G-30-S/PKI 1965 membuktikan kepada kita dan dunia bahwa Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia teruji, tangguh dan tetap sakti.



5 Harapan Kita, Sebuah Renungan

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang digali dari bumi Nusantara. Prinsip dasar hidup itu memiliki nilai luhur yang tiada tara dan telah terbukti mampu mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila yang digali dari nilai budaya masyarakat Indonesia itu tidak diragukan lagi merupakan prinsip dasar dalam menghadapi era modernisasi dan globalisasi yang terjadi dewasa ini. Dalam dinamika masyarakat dan bangsa Indonesia, Pancasila juga telah menunjukkan kesaktian dan kekuatannya ketika berhadapan dengan berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri.

Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mampu menjadi faktor penguat rasa kebangsaan dan kenegaraan Indonesia tidak hanya ketika berhadapan dengan kekuatan bangsa asing pada era penjajahan kolonial, tetapi juga setelah kemerdekaan. Tetap diperlukan upaya terus-menerus untuk merevitalisasi nilai luhur Pancasila agar dapat digunakan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masa modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia dewasa ini. Jika pada masa lalu musuh kita adalah penjajahan kolonial, sekarang musuh bersama kita adalah kemiskinan,



Memetik harapan

keterbelakangan, kebodohan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang harus diperangi dengan mengangkat nilai luhur Pancasila.

Makna Kesaktian Pancasila

Setiap tahun, kita, bangsa Indonesia, memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai salah satu momentum untuk melakukan introspeksi dan refleksi-diri terhadap apa yang telah kita alami pada masa lalu. Ini menjadi penting ketika kita melangkah pada masa kini dan berharap pada masa mendatang. Pengalaman masa lalu seperti

peronggrongan terhadap ideologi Pancasila oleh kaum komunis dalam peristiwa G-30-S/PKI diharapkan tidak terulang kembali. Peristiwa itu merupakan wujud usaha mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. Sangat tragis, dalam peristiwa itu putra-putra terbaik bangsa gugur sebagai Pahlawan Revolusi, dibunuh secara keji oleh kaum komunis. Namun, berkat keteguhan para pahlawan tersebut, dan kesadaran bangsa Indonesia umumnya untuk mempertahankan Pancasila, maka upaya mengganti dasar negara tersebut mengalami kegagalan.

Sejak saat itu, kita menetapkan 1 Oktober sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah bahwa dasar negara Indonesia, Pancasila, terbukti sakti, dan tidak mudah diganti dengan ideologi lain yang tidak berakar dari nilai luhur bangsa Indonesia. Kesaktian Pancasila bukan dalam arti "mistik," atau semacam kekuatan super-natural, melainkan pada kebenarannya sebagai jiwa kepribadian bangsa. Tragedi nasional 1965 membuktikan bahwa bangsa Indonesia tetap berpegang teguh dan meyakini kebenaran Pancasila. Peristiwa itu dianggap sebagai sebuah cobaan dan merupakan bahaya laten bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Akibat peristiwa itu, selayaknya jika kita semakin sadar untuk terus memupuk, merawat dan mengembangkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai usaha apa pun dan dari mana pun yang ingin mengganti Pancasila dengan paham lain yang tidak sesuai dengan nilai budaya kita.

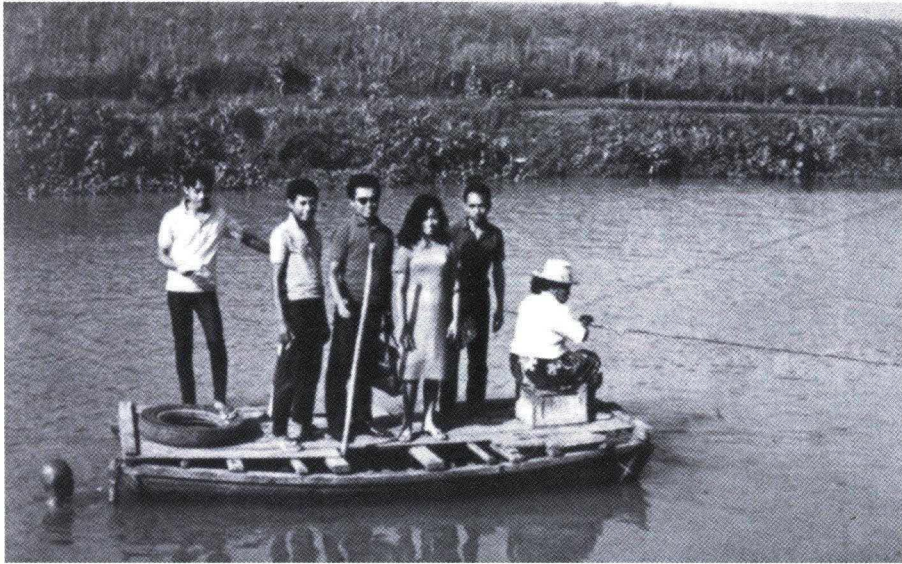
Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita juga berharap rasa memiliki Pancasila semakin kukuh. Memahami peringatan Hari Kesaktian Pancasila bermakna meyakini kebenaran ideologi bangsa dan dasar negara yang telah digali, diolah, dan dikembangkan para pendiri bangsa melalui proses sejarah yang panjang. Kita perlu terus-menerus menyerap dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tetap relevan bagi kehidupan sehari-hari kita.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada dasarnya untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, sebagai pedoman membangun masyarakat ke arah kehidupan yang sejahtera lahir-batin. Perlu ada kejujuran untuk mengakui bahwa pada masa lalu, Pancasila tidak sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan rakyat dan bangsa. Pancasila hanya dijadikan jargon politik yang hanya digunakan untuk kepentingan politik para penguasa dan golongan tertentu. Rezim yang berkuasa pada saat itu dianggap menyalahgunakan Pancasila sebagai alat untuk mengeliminasi berbagai upaya dan tuntutan demokratisasi yang mulai meng-gema setelah beberapa dekade dalam suasana kestabilan politik dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Indonesia yang berada jauh di wilayah terpencil, tertinggal dan di pulau-pulau terpencil hampir tidak merasakan arti pertumbuhan ekonomi yang dikejar pada waktu itu. Tidak mengherankan jika mereka menanyakan bagaimana sebenarnya kebijakan peme-rintah dalam menangani persoalan pembangunan yang sesuai prinsip dasar Pancasila.

Kini, dalam suasana reformasi, pemerataan pembangunan sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah supaya keadilan secara ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam era reformasi, Pancasila harus digemakan agar kesatuan dan persatuan yang dilandasi kehi-dupan masyarakat yang adil dan sejahtera semakin terpelihara. Momentum reformasi dalam era globalisasi saat ini merupakan saat untuk membuktikan bahwa kesaktian Pancasila benar-benar dapat memandu penyelesaian berbagai masalah bangsa.

Revitalisasi Pancasila dan Masalah Kontemporer Bangsa

Sejak reformasi berlangsung beberapa tahun lalu, dirasakan terjadi kemunduran pemaknaan ideologi Pancasila seiring meningkatnya liberal-isasi dan demokratisasi dunia

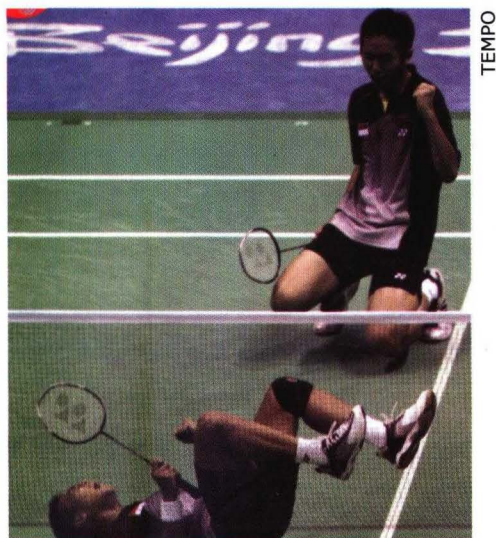


Meniti kebersamaan

yang menjamah sampai ke Indonesia. Selain itu, di tengah euforia reformasi dan globalisasi saat ini, banyak orang mulai kehilangan pegangan nilai nasionalisme yang sudah dimiliki jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dicapai. Muncul harapan masyarakat agar kesaktian Pancasila diberdayakan tidak hanya dalam konteks ideologi politik berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjawab persoalan konkret bangsa. Dengan meresapi makna Pancasila, segenap elemen bangsa diharapkan mampu menjawab persoalan keseharian masyarakat, di samping memantapkan tekad dan semangat serta menghayati cita-cita perjuangan para Pahlawan Revolusi, yaitu tetap setia kepada Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa persoalan mendasar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yang perlu diselesaikan dengan tetap mengacu pada nilai dasar Pancasila.

Misalnya otonomi daerah, kemiskinan, daya saing, konflik sosial, demokratisasi, hukum dan hak asasi manusia. Di bidang politik perlu terus ditumbuhkan masyarakat sipil (*civil society*), dikembangkan proses kehidupan dan pemerintahan yang demokratis. Persoalan mendesak lainnya adalah lemahnya dimensi kualitas manusia Indonesia, otonomi daerah yang belum berjalan sesuai harappk, jumlah angka kemiskinan yang masih tinggi, daya saing yang masih rendah, sumber daya alam yang mengalami degradasi, krisis keuangan dan ekonomi yang berimbas pula terhadap krisis politik dan



Meraih kemenangan

social, serta pecahnya konflik multidimensi.

Dalam semangat otonomi daerah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, tradisi budaya yang sangat beragam memerlukan pengayoman dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sangat disadari, Pancasila menekankan kesatuan dan persatuan tanpa mematikan atau melenyapkan kebhinnekaan masyarakat sepanjang tidak membahayakan keutuhan kehidupan sosial kita. Dengan demikian, proses integrasi bangsa terus berjalan, potensi yang disintegratif diharapkan dapat diselesaikan berdasarkan nilai dalam Pancasila yang merupakan saripati budaya Nusantara. Pancasila tidak melihat kebhinnekaan dan

kesatuan-persatuan sebagai suatu yang kontradiktif dan bernuansa perlawanan, melainkan merangkul kedua-duanya.

Kerangka dasar kehidupan nasional yang mendasarkan diri pada Pancasila melihat keragaman suku, agama, ras sebagai kekayaan bangsa. Namun, jiwa dan semangat Pancasila juga memiliki batas yang menyangkut tetap tegaknya kesatuan-persatuan agar kebhinnekaan itu tetap berfungsi sebagai kekayaan dan modal bangsa. Revitalisasi Pancasila dalam era modernisasi dan globalisasi ini dimaksudkan agar Pancasila tetap bertahan sebagai dasar negara yang bermakna menjaga keutuhan negara Indonesia. Dengan demikian, kita merasakan lebih mendalam bahwa Pancasila adalah milik kita bersama yang mengayomi seluruh penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Ini pula yang menjadi harapan masyarakat Indonesia berkaitan dengan seberapa jauh pemaknaan kesaktian Pancasila dalam era penuh keterbukaan dan kemandirian sebagai masyarakat yang madani.

Untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejati, sistem dan pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila harus menjadi nada dasar dan jiwa seluruh ketentuan perundangan atau peraturan di negeri ini. Hukum nasional yang dibangun di Indonesia harus bernapaskan Pancasila, yang memenuhi rasa keadilan segenap masyarakat Indonesia yang majemuk. Tidak ada satu pun anggota masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil dalam kehidupan masyarakat dan negara yang berdasarkan Pancasila. Segala proses pembuatan kebijakan tentu harus berlandaskan nilai Pancasila dan terlihat aktualisasinya dalam masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air. Oleh karena itu, betapa pentingnya dalam membuat kebijakan, pemerintah harus menyesuaikan dengan isi Pancasila. Model kebijakan sosial yang humanis, demokratis, pluralis dan berkelanjutan, sistem manajemen kelembagaan yang sesuai prinsip *good governance* diharapkan dapat terwujud pada masa yang akan datang.

Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan diukur dengan terwujudnya kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. Tugas kaum terpelajar sebagai generasi penerus untuk mengartikulasikan keinginan rakyat untuk maju dengan mewarnai Pancasila yang memiliki rumusan tajam di segala bidang untuk menjawab tantangan zaman yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Kaum terpelajar Indonesia harus berperan aktif untuk memberikan pelajaran dan teladan bagi masyarakat luas. Tanggung jawab untuk mengamankan Pancasila dan UUD 1945 memang harus diserahkan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus mampu hidup secara kompetitif atau berdaya saing tinggi di kancah dunia luas.

Generasi muda harus proaktif ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekarang ini. Munculnya berbagai konflik, tingkat kemiskinan, proses demokratisasi, pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan sebagainya, akan menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk dicarikan pemecahannya. Proses desentralisasi dan pemilihan kepala daerah juga menjadi masalah penting yang harus dicarikan solusinya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik di masa depan. Tambahan pula, di beberapa wilayah terjadi konflik pertanahan atau kehutanan yang melibatkan pemerintah, investor dan masyarakat lokal sendiri. Hal itu memerlukan pemikiran yang cerdas agar pencarian solusi terhadap masalah diharapkan dapat diperoleh selaras nilai luhur Pancasila.

Pada masa lalu, konflik antara negara dan rakyat, seperti kasus konflik pertanahan atau demonstrasi menentang kebijakan pemerintah, sering "diselesaikan" dengan stigma anti-Pancasila. Indoktrinasi Pancasila sebagai sebuah kekuatan sakral nan sakti, yang sering dilakukan selama periode Orde Baru, justru mendangkalkan pemaknaan terhadap Pancasila. Pada masa sekarang tampak suasana keterbukaan sehingga rakyat

yang merasakan ketidakadilan dapat menyampaikan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Ini merupakan langkah maju karena masyarakat diberi peran dan porsi yang lebih banyak untuk memandang kritis berbagai kebijakan yang dianggap kurang relevan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Suasana ini tampaknya mulai mendapat tempat yang lebih baik sehingga memungkinkan berkembangnya perspektif baru terhadap Pancasila.

Di tengah berbagai pandangan atas peran dan posisi Pancasila yang berkembang saat ini, tampak ada satu garis merah yang disepakati bersama yaitu bahwa Pancasila bagaimanapun juga telah menjadi ciri khas dan jatidiri bangsa Indonesia yang harus dipertahankan seterusnya. Memang, pada masa lalu ada sedikit kekhawatiran bahwa jiwa Pancasila akan rapuh ketika bangsa Indonesia belajar berdemokrasi, namun realitasnya tidak demikian karena Pancasila memang digali dan menjadi milik bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila selalu terbuka untuk dikembangkan melalui proses pengalaman berbangsa dan bernegara secara bersama-sama. Rakyat sendiri pada kenyataannya sudah jenuh dengan pengkotak-kotakan yang mencetuskan konflik horisontal. Mereka mengharapkan para pemimpin supaya benar-benar memperbaiki keadaan dan memprioritaskan kepentingan rakyat banyak.

Dengan demikian, bangsa ini sebenarnya masih memerlukan momentum yang mampu menggugah kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus dijaga dan dipertahankan agar keberadaan masyarakat dan bangsa Indonesia terjamin selamanya. Perlu disadari bahwa tanpa Pancasila, negeri ini akan digerogeti tidak hanya oleh kekuatan luar tetapi juga oleh bangsanya sendiri.

Penutup

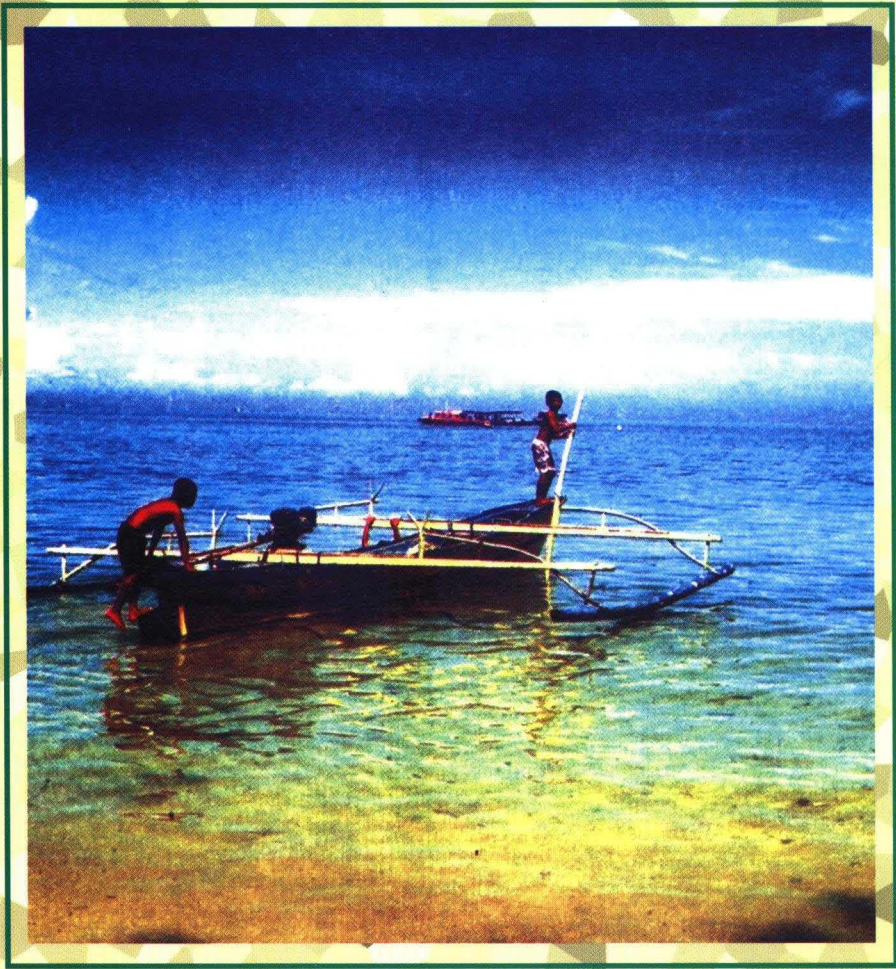
Belajar dari pengalaman masa lalu, seperti ketika terjadi tragedi nasional, banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya merupakan akumulasi dari rangkaian pelajaran kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun peradaban bangsa yang berbudi luhur. Bangsa Indonesia sudah melewati perjalanan panjang dan berusaha tetap bersatu dan terus melangkah maju. Bangsa Indonesia pun semakin diperhitungkan di kancah global, sementara terdapat negara yang gagal karena mereka tidak mampu menahan berbagai perubahan zaman yang berjalan begitu cepat.

Upaya mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting ditanamkan dan sekaligus untuk menjaga kelestarian Pancasila sebagai dasar negara, serta mewarisi semangat juang, meneladani dan menghayati tindakan patriotik dari para pahlawan revolusi. Menggelorakan semangat dan nilai-nilai Pancasila dalam hidup bersama sebagai bangsa, ketika kemajuan zaman menawarkan nilai-nilai baru, sungguh amat relevan. Jika pada masa penjajahan kita berhadapan dengan musuh kolonial dengan mengangkat senjata, bambu runcing, maka setelah kemerdekaan dan globalisasi kita lebih banyak membutuhkan kecerdasan pikiran sebagai bangsa yang cerdas untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan dan kemelaratan yang diderita masyarakat di pelosok dan berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Sebagai dasar negara, Pancasila membuktikan mampu menjadi media pemersatu kehidupan bersama warga negara, atas hak dan kewajiban yang sama dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam etnis, tradisi budaya, dan agama. Tugas utama kita sekarang adalah menjamin terpeliharanya ketentraman, ketertiban dan

kedamaian serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai modal dasar yang amat menentukan dalam menciptakan stabilitas keamaan. Rakyat Indonesia terus mendukung dan mendorong Pancasila sebagai falsafah bangsa dan bernegara. Untuk itu, Pancasila yang dijadikan pijakan dasar, sekaligus menjadi identitas kebangsaan Indonesia selama ini, harus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat Indonesia di mana pun mereka berada. Pancasila sebagai ideologi terbuka memang dapat berkembang menjadi sesuatu yang dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Setiap generasi dan kelompok masyarakat dimungkinkan memberikan makna dan mewujudkan dalam keragaman.

Pancasila merupakan sumber kearifan dan kekuatan bangsa sehingga menyadarkan bangsa ini setiap menghadapi cobaan dan krisis sekaligus untuk merajut kembali peratuan dan kesatuan yang retak menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Pancasila hendaknya secara terus-menerus direvitalisasi sehingga mampu mempersatukan kebhinne-kaan dan sekaligus mampu mengantisipasi perubahan dalam era modernisasi dan globalisasi. Contoh teladan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus dilaksanakan oleh semua warga negara masyarakat di Indonesia dan tidak mempolitisasinya untuk kepentingan tertentu dan bersifat sesaat, akan tetapi benar-benar memandangnya sebagai nilai luhur yang menjadi pedoman bagi kita untuk menuju Indonesia yang gemilang.



TEMPO

Daftar Pustaka

- Ali, J. Tumenggung Sis, dkk, *Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila Pancasila: Daerah Sulawesi Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Anderson, David Charles, *Kudeta Madiun 1948* (terj.). Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- Anwar, H. Rosihan, *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961--1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Bahar, Saafoedin (ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998.
- van Dijk, Cornelis, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (terj.). Jakarta: Grafiti Pres, 1983.
- Edman, Peter, *Komunisme ala Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950--1965* (terj.). Townsville: James Cook University of North Queensland, 2005.
- Feith, Herbert, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin* (terj.) Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Feith, Herbert (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945--1965* (terj.). Jakarta: LP3ES, 1988.
- Gunawan, Restu, *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan*. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Ibrahim, Anwar, *Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila Pancasila: Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Ismail, Faisal, *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945--1995*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Departemen Agama, 2001.

- Kasdi, Aminuddin dan G. Ambar Wulan, *G.30 S/PKI 1965 Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia*. Surabaya: Jawa Pustaka Media Utama, 2005.
- Legge, John D., *Sukarno Biografi Politik* (terj.). Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. Jakarta: Idayu Press, 1984.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mortimer, Rex, *Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics 1959--1965*. Singapura: Equinox, 2006.
- Onghokham, *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, dan G 30 S 1965*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Pandil Sastrowardoyo, dkk, *Ungkapan Tradisional Yang Berkaitan dengan Sila-sila Pancasila: Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Pattikayhatu, J.A, dkk, *Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila Pancasila: Daerah Maluku*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Poespowardojo, Soerjanto, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, Jilid IV A. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1994.
- Reksodihardjo, Soegeng, dkk, *Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila Pancasila: Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Ruslan, dkk, *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*, Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008.
- Samsudin, Mayjen (Purn.), *Mengapa G.30 S/PKI Gagal? (Suatu Analisa)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Tanpa Pengarang, *Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila Pancasila: Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Tim PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H. Nasution*. Jakarta: PT Grafitipers, 1998.



Pahlawan Revolusi

Atas:

Letnan Jenderal Ahmad Yani
Mayor Jenderal R. Soeprapto
Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo
Mayor Jenderal Siswondo Parman
Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan
Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo
Lettu Pierre Andreas Tendean

Bawah:

Kolonel Katamso D
Letkol Sugiyono
Brigadir Pol. K.S. Tubun



**Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
Jakarta, 2010**